

# INDIKATOR PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**

# INDIKATOR PENDIDIKAN

## PROVINSI PAPUA TAHUN 2018





## INDIKATOR PENDIDIKAN PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ISSN	: 2477-4154
No.Publikasi	: 94520.1902
Katalog BPS	: 4302002.94
Ukuran Buku	: B5 (JIS)
Jumlah Halaman	: xii + 92

### **Naskah**

Bidang Statistik Sosial

### **Penyunting**

Bidang Statistik Sosial

### **Desain Kover**

Bidang Statistik Sosial

### **Sumber Ilustrasi**

Freepik.com

Komunitas EduFor Papua

Google.com

Ceposonline.com

Nirwan Ahmad Arsuka

### **Penerbit**

©Badan Pusat Statistik Provinsi Papua

### **Pencetak**

CV. Mitra Karya Pura

*Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik*

## KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2018 merupakan salah satu publikasi rutin terbitan BPS Provinsi Papua dan merupakan publikasi kesebelas yang diterbitkan sejak tahun 2007. Publikasi ini memperlihatkan perkembangan indikator pendidikan secara berkesinambungan, sumber data dihasilkan dari pengolahan data primer yang dikumpulkan BPS Provinsi Papua melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang rutin dilaksanakan setiap tahun serta data sekunder dari instansi terkait lainnya.

Publikasi ini tentu masih memiliki berbagai keterbatasan, BPS Provinsi Papua terus berusaha menyediakan data, menerbitkan publikasi, serta memberikan ulasan berbagai data hasil survei, supaya data yang disajikan lebih mudah dipahami bagi para pengguna. Diharapkan, publikasi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan perencanaan dalam menyusun berbagai program dan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan, dan tentunya menuju peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Kritik dan saran membangun demi penyempurnaan penerbitan publikasi di masa yang akan datang tentu kami harapkan. Akhir kata, kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penerbitan publikasi ini disampaikan terima kasih.

Jayapura, Mei 2019

Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Papua,



**Drs. Simon Sapary, M.Sc**

***Penanggung Jawab***

Simon Sapary, M.Sc

***Editor***

Bagas Susilo, M.Si

Fransiska Engeline Moko, M.Si

***Pengolah Data***

Fransiska Engeline Moko, M.Si

***Penulis***

Rahmad Adi Subektianto, S.Stat

***Layout***

Rahmad Adi Subektianto, S.Stat

***Desain Cover***

Rahmad Adi Subektianto, S.Stat

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Katalog	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	ix
Daftar Tabel Lampiran	x
Ringkasan Eksekutif	1
<b>BAB 1. METODOLOGI</b>	
Metode Pengumpulan Data	4
Cakupan Sampel	5
Metode Analisis	7
Konsep dan Defenisi	7
<b>BAB 2. PENDIDIKAN MERATA DAN BERKUALITAS</b>	
Tantangan Pembangunan Pendidikan: Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	16
Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pemerataan Pendidikan	17
<b>BAB 3. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN</b>	
Jumlah Sekolah dan Peserta Didik	21
Rasio Murid Guru	24
<b>BAB 4. PARTISIPASI SEKOLAH</b>	
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	29
Angka Kesiapan Sekolah (AKS)	33
Partisipasi Sekolah	35
Angka Partisipasi Kasar	41

	<i>Halaman</i>
Angka Partisipasi Murni	44
Rasio Angka Partisipasi Murni	46
Sekolah dan Sarana Transportasi	47
<b>BAB 5. HASIL DAN CAPAIAN</b>	
Angka Melek Huruf	54
Rata-rata Lama Sekolah	56
Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	58
Hasil Proses Pendidikan	61
Angka Putus Sekolah	63
Alasan Putus Sekolah	65
Kebiasaan Belajar di Luar Jam Sekolah	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	71
<b>LAMPIRAN</b>	74

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1.1. Persentase <i>Response Rate</i> Blok Sensus dan Rumah Tangga Susenas 2018 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	5
Tabel 3.1. Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	22
Tabel 3.2. Perkembangan Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	22
Tabel 3.3. Perkembangan Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018	23
Tabel 3.4. Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan Tahun Ajaran 2017/2018	24
Tabel 4.1. Jenis Pendidikan Pra Sekolah Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018	33
Tabel 4.2. Partisipasi Sekolah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2018	36
Tabel 4.3. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2018	41
Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2018	42
Tabel 4.5. Angka Partisipasi Murni Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2018	44
Tabel 4.6. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Sekolah, 2018	48

	<i>Halaman</i>
Tabel 4.7. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Sekolah, 2018	49
Tabel 5.1. Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2018	55
Tabel 5.2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2018	57
Tabel 5.3. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah Tempat Tinggal, 2018	60
Tabel 5.4. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, 2018	61
Tabel 5.5. Angka Mengulang, Angka Bertahan, Angka Melanjutkan, dan Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2018	62
Tabel 5.6. Persentase Penduduk 5-24 Tahun yang Belum Pernah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utama dan Jenis Kelamin, 2018	66
Tabel 5.7. Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Kebiasaan Belajar di Luar Jam Sekolah, 2018	68

## DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 4.1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 0-6 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018	31
Gambar 4.2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 0-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2018	32
Gambar 4.3. Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Jenis Kelamin, 2018	35
Gambar 4.4. Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7-24 Tahun 2017-2018	38
Gambar 4.5. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2018	40
Gambar 4.6. Rasio Angka Partisipasi Murni Menurut Jenjang Pendidikan, 2018	46
Gambar 5.1. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas, 2018	59
Gambar 5.2. Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2018	64
Gambar 5.3. Alasan Utama Penduduk 5-24 Tahun yang Belum Pernah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2018	65

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

		<i>Halaman</i>
Tabel 1	Persentase Penduduk 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2018	75
Tabel 2a	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018	76
Tabel 2b	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018	77
Tabel 2c	Persentase Penduduk Perempuan Usia 5 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018	78
Tabel 3a	Persentase Penduduk Laki-laki Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018	79
Tabel 3b	Persentase Penduduk Perempuan Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018	80
Tabel 3c	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018	81
Tabel 4	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2018	82
Tabel 5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2018	83
Tabel 6	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2018	84
Tabel 7	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	85

*Halaman*

Tabel 8	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 – 24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	86
Tabel 9	Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	87
Tabel 10	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018	88
Tabel 11	Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2018	89
Tabel 12	Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2018	90
Tabel 13	Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2018	91



# RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan salah satu visi Provinsi Papua yaitu Papua Bangkit, bangkit dalam segala aspek salah satunya aspek pendidikan. Provinsi Papua secara umum telah berhasil meningkatkan akses pendidikan di semua jenjang, meskipun masih belum mencapai target Kemendikbud RI. Berdasarkan hasil Susenas 2018, capaian beberapa indikator pendidikan seperti kemampuan baca tulis laki-laki dan perempuan 15 tahun keatas, kemampuan baca tulis laki-laki dan perempuan 15-24 tahun, maupun APS dan APM pada semua jenjang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut mengindikasikan bahwa arah pembangunan pendidikan di Papua sudah tepat, yaitu memberikan akses dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, dalam rangka mewujudkan manusia Papua yang lebih berkualitas.

Aspek pendidikan merupakan investasi jangka panjang sebagai modal manusia untuk menjadikan dirinya sebagai persediaan (*stock*) pembangunan. Indikator yang digunakan untuk mengukur *stock* dalam publikasi diantaranya adalah angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, dan pendidikan yang ditamatkan, hal ini didukung dengan data Susenas tahun 2018 menunjukkan peningkatan hasil pembangunan pendidikan dibandingkan tahun sebelumnya, hasil ini tentunya menjadi pemicu untuk lebih semangat meningkatkan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.

Di tengah upaya untuk terus meningkatkan akses pendidikan seluas-luasnya, Papua juga diperhadapkan dengan tantangan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan, khususnya distribusi pendidikan. Apabila dilihat distribusi pendidikan di Papua, ketimpangan pendidikan masih terlihat jelas menurut jenis kelamin terutama pada partisipasi sekolah, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf terlebih lagi antar kabupaten/kota dan tipe daerah (perkotaan dan perdesaan). Kabupaten yang berada di wilayah pesisir atau perkotaan capaian pendidikannya jauh lebih baik daripada kabupaten di wilayah pegunungan atau perdesaan. Publikasi ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kualitas pembangunan pendidikan di Provinsi Papua.



# 1



# METODOLOGI



Penulisan publikasi Indikator Pendidikan Provinsi Papua 2018 menggunakan data Kor Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 sebagai sumber data utama. Dari beberapa kegiatan pengumpulan data yang dilaksanakan BPS, Susenas merupakan survei yang memiliki beberapa kelebihan. Pertama, bila dibandingkan dengan survei lain, Susenas memiliki cakupan data sosial paling luas, salah satu di antaranya adalah data pendidikan. Kedua, Susenas dapat memenuhi sebagian kesenjangan kebutuhan data yang paling mendesak. Hal ini dimungkinkan karena mulai tahun 2015 pencacahan Susenas dilaksanakan dua kali setahun yaitu bulan Maret dan September, di mana pencacahan bulan Maret dengan jumlah sampel besar untuk menghasilkan data yang representatif sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan pencacahan bulan September dengan ukuran sampel kecil untuk menghasilkan data yang representatif hanya untuk estimasi provinsi dan nasional.

Selain itu, untuk mempertajam analisis mengenai kondisi pendidikan di Provinsi Papua, publikasi ini juga dilengkapi dengan data-data terkait yang bersumber dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Provinsi Papua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk data realisasi APBD di sektor pendidikan, serta data-data pendukung lainnya.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data Susenas dilakukan dengan mendatangi langsung rumah tangga terpilih dan melakukan wawancara secara langsung antara petugas pencacah dengan responden. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang ditujukan kepada individu, maka yang menjadi responden untuk mendapatkan keterangan ini adalah individu yang bersangkutan. Sementara untuk keterangan mengenai rumah tangga, dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga, atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik rumah tangga yang ditanyakan.

## Cakupan Sampel

Target blok sensus Susenas Tahun 2018 sebesar 1.104 sampel yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Papua. Sebaran sampel yang sebagian besar di wilayah sulit dan susah dijangkau menyebabkan tidak semua sampel blok sensus tersebut berhasil dikunjungi, sehingga dari seluruh kabupaten/kota hanya 1.099 blok sensus (99,55 persen) yang berhasil dikunjungi oleh petugas lapangan. Selanjutnya dalam proses kompilasi data di BPS RI, terdapat data rumah tangga (ruta) yang tidak diikutsertakan karena dianggap sebagai pencilan maupun karena data yang masuk sudah melampaui batas waktu pengolahan. Dengan demikian *raw data* final Susenas 2018 Provinsi Papua berjumlah 10.960 ruta atau dengan *response rate* sebesar 99,28 persen.

Syarat utama untuk mendapatkan statistik yang valid adalah ketepatan dalam menggambarkan atau mewakili (merekpresentasikan) informasi. Artinya untuk menghasilkan statistik yang valid dibutuhkan kecukupan sampel yang dapat mewakili populasinya. Besar kecilnya *response rate* sampel rumah tangga terkait dengan estimasi statistik yang dihasilkan. Jika jumlah sampel yang dikumpulkan tidak mencukupi maka estimasi statistik yang dihasilkan akan bias dan menjauhi nilai parameternya. *Response rate* sampel rumah tangga antar kabupaten/kota berbeda-beda dan dapat digolongkan menjadi tiga kelompok yaitu:

- Kabupaten dengan *response rate* baik (lebih dari 90 persen) sebanyak 28 kabupaten/kota.
- Kabupaten dengan *response rate* cukup (75 persen s/d 90 persen) sebanyak 1 kabupaten/kota.
- Kabupaten dengan *response rate* rendah (kurang dari 75 persen) tidak ada.

Informasi *response rate* blok sensus dan rumah tangga selengkapnya disajikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1

**Persentase *Response Rate* Blok Sensus dan Rumah Tangga Susenas 2018 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua**

Kabupaten/Kota	Target BS	BS Data Final		Target Ruta	Ruta Data Final	%
		Jumlah	%			
[01] Merauke	44	44	100,00	440	440	100,00
[02] Jayawijaya	48	48	100,00	480	480	100,00
[03] Jayapura	40	40	100,00	400	400	100,00
[04] Nabire	40	40	100,00	400	400	100,00
[08] Kep, Yapen	40	40	100,00	400	400	100,00
[09] Biak Numfor	44	44	100,00	440	440	100,00
[10] Paniai	44	44	100,00	440	440	100,00
[11] Puncak Jaya	40	40	100,00	400	400	100,00

Kabupaten/Kota	Target BS	BS Data Final		Target Ruta	Ruta Data Final	%
		Jumlah	%			
[12] Mimika	48	48	100,00	480	480	100,00
[13] Boven Digoel	36	36	100,00	360	360	100,00
[14] Mappi	40	40	100,00	400	400	100,00
[15] Asmat	40	40	100,00	400	400	100,00
[16] Yahukimo	48	48	100,00	480	480	100,00
[17] Pegunungan Bintang	40	40	100,00	400	400	100,00
[18] Tolikara	44	43	97,73	440	430	97,73
[19] Sarmi	24	24	100,00	240	240	100,00
[20] Keerom	36	36	100,00	360	360	100,00
[26] Waropen	20	20	100,00	200	200	100,00
[27] Supiori	20	20	100,00	200	200	100,00
[28] Mamberamo Raya	20	18	90,00	200	180	90,00
[29] Nduga	40	40	100,00	400	400	100,00
[30] Lanny Jaya	48	48	100,00	480	480	100,00
[31] Mamberamo Tengah	28	28	100,00	280	280	100,00
[32] Yalimo	36	36	100,00	360	360	100,00
[33] Puncak	40	38	95,00	400	380	95,00
[34] Dogiyai	40	40	100,00	400	400	100,00
[35] Intan Jaya	28	28	100,00	280	250	89,29
[36] Deiyai	36	36	100,00	360	360	100,00
[71] Jayapura	52	52	100,00	520	520	100,00
<b>Papua</b>	<b>1 104</b>	<b>1 099</b>	<b>99,55</b>	<b>11 040</b>	<b>10 960</b>	<b>99,28</b>

Sumber: Susenas 2018

Publikasi ini menyajikan berbagai indikator pendidikan yang dapat menggambarkan kondisi capaian pembangunan pendidikan di Provinsi Papua, Keakuratan berbagai indikator tersebut bergantung pada kecukupan sampel yang dibutuhkan masing-masing indikator untuk dapat mewakili populasinya, Semakin kecil peluang terjadinya suatu kasus atau indikator (*rare cases*) maka semakin besar jumlah sampel yang dibutuhkan,

Manar Abdel Rahman mengemukakan bahwa indikator dalam bentuk proporsi atau persentase yang baik dihasilkan dari sejumlah sampel (tanpa pembobot) dengan denominator sebesar

50<sup>1</sup>, Sebuah indikator dengan denominator berada di antara 25 – 50 masih dapat digunakan namun perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan, Sementara itu, apabila nilai denominatornya berada di bawah 25 maka indikator tersebut lebih baik tidak digunakan, Susenas merupakan survei berbasis rumah tangga, oleh sebab itu penyajian data dalam publikasi ini mengacu pada kaidah di atas, Dalam tabel lampiran disertakan jumlah sampel dari setiap indikator, nilai indikator yang diberi tanda [,,] berarti perlu kehati-hatian dalam menginterpretasikan, sedangkan indikator yang diberi tanda n,a, artinya tidak dapat disajikan terkait kecukupan sampel,

## Metode Analisis

Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data pendidikan yang bersifat umum dan berkaitan langsung dengan perkembangan pendidikan masyarakat, Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang tujuannya adalah memberikan gambaran tentang keadaan pendidikan di Provinsi Papua pada tahun 2018,

## Konsep dan Definisi

Untuk lebih memahami dan menyamakan pengertian dalam membaca publikasi ini, berikut disajikan konsep dan definisi yang digunakan, Konsep dan definisi yang disajikan dibatasi hanya pada indikator yang disajikan, seperti angka partisipasi sekolah, jenjang pendidikan tertinggi yang pernah atau sedang diduduki, ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki, dan persentase penduduk yang buta huruf, Berikut konsep dan definisi yang terkait dengan indikator yang disajikan dalam publikasi ini.

### ▪ Partisipasi Sekolah

Seseorang dikatakan bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar di suatu jenjang pendidikan formal, baik yang di bawah pengawasan Kemendiknas maupun instansi lain,

---

<sup>1</sup> Bahan ajar dalam *Workshop Analisis Data dan Penulisan Laporan Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) Tanah Papua 2012*

Partisipasi sekolah yaitu menunjukkan keadaan status pendidikan seseorang saat ini, Partisipasi sekolah terbagi menjadi tiga yaitu:

**Tidak/belum pernah bersekolah** adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanak-kanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar;

**Masih bersekolah** adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal;

**Tidak bersekolah lagi** adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat pencacahan tidak lagi terdaftar dan tidak aktif,

#### ▪ **Jenjang Pendidikan**

Jenjang pendidikan formal terdiri dari:

1. **Jenjang pendidikan dasar** meliputi Sekolah Dasar (SD) termasuk SD kecil/pamong (pendidikan anak oleh masyarakat, orang tua, dan guru), Sekolah Luar Biasa (SLB) tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) umum/kejuruan (termasuk SMP terbuka, SMEP, ST, SKKP) Madrasah Tsanawiyah (MTs),
2. **Jenjang pendidikan menengah** meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (antara lain SMEA, STM, SMIP, SPG, SGA, termasuk sekolah kejuruan yang dikelola oleh departemen selain Depdiknas),
3. **Jenjang pendidikan tinggi** meliputi:
  - (1) **Program gelar** adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian akademik, yaitu keahlian yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan, peningkatan/penerapan konsep, dan metode operasional dalam suatu bidang ilmu, teknologi, atau seni yang dikelola oleh suatu perguruan tinggi, mencakup pendidikan

sarjana muda, pendidikan sarjana/strata I (S1), pendidikan pasca sarjana/strata II (S2), dan pendidikan doktor/strata III (S3),

- (2) **Program non-gelar** adalah program yang memberikan tekanan pada pembentukan keahlian profesional, seperti keahlian yang menekankan pada keterampilan dan penerapan suatu bidang ilmu pengetahuan, teknologi atau seni dalam pekerjaan, Program ini mencakup pendidikan diploma I (D,I), pendidikan diploma II (D,II), pendidikan diploma III (D,III), pendidikan diploma IV (D,IV), pendidikan spesialis 1 (Sp 1), pendidikan spesialis 2 (Sp 2),

▪ **Jenjang dan Jenis Pendidikan Tertinggi yang pernah/sedang Diduduki**

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah diduduki oleh seseorang yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang sedang diduduki oleh seseorang yang masih bersekolah,

**Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)** adalah Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar, sekolah dasar kecil, sekolah dasar pamong);

**Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ sederajat/kejuruan** adalah Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat (MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri (SKP), Sekolah Menengah Ekonomi Pertama (SMEP), Sekolah Teknik (ST), Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama (SKKP), Sekolah Keterampilan Kejuruan, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu (SGB), Pendidikan Guru Agama (PGA), Kursus Pegawai Administrasi (KPA), Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama);

**Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA)/sederajat** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas (KPAA));

**Sekolah Menengah Kejuruan(SMK)** adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analisis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen;

**Program D,I/II** adalah program D,I/D,II pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal;

**Program D,III** adalah program D,III atau mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu akademi/perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma/mengeluarkan gelar sarjana muda;

**Program D,IV/S1** adalah program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu perguruan tinggi; S2/S3 adalah program pendidikan pasca sarjana (master atau doktor), spesialis 1 atau 2 pada suatu perguruan tinggi,

- **Ijazah/ STTB Tertinggi yang Dimiliki**

**Tidak punya ijazah SD dan sederajat** adalah mereka yang tidak memiliki ijazah SD/MI/sederajat, Mereka pernah bersekolah di Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (antara lain Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, paket A1-A100, Paket A Setara) tetapi tidak/belum tamat, Termasuk juga mereka yang tamat sekolah dasar 3 tahun atau yang sederajat;

**SD** adalah tamat Sekolah Dasar 5/6/7 tahun atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa tingkat dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, atau paket A1-A100);

**Madrasah Ibtidaiyah (MI)** adalah tamat Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat dengan Sekolah Dasar;

**SMP Umum/Kejuruan** adalah tamat Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan, atau yang sederajat, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama, Sekolah Kepandaian Putri, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Teknik, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama, Sekolah Keterampilan Kejuruan 4 tahun, Sekolah Usaha Tani, Sekolah Pertanian Menengah Pertama, Sekolah Guru Bantu, Pendidikan Guru Agama 4 tahun, Kursus Pegawai Administrasi, dan Pendidikan Pegawai Urusan Peradilan Agama;

**Madrasah Tsanawiyah (MTs)** adalah tamat Madrasah Tsanawiyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Pertama;

**SMA/sederajat** adalah tamat Sekolah Menengah Atas, atau yang sederajat (HBS 5 tahun, AMS, dan Kursus Pegawai Administrasi Atas);

**Madrasah Aliyah (MA)** adalah tamat Madrasah Aliyah yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas;

**SMK** adalah tamat sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru,

Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker, Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Rontgen, HBS 5 tahun;

**Diploma I/II** adalah tamat program DI/DII pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma;

**Diploma III/Sarjana Muda**, adalah yang telah mendapatkan gelar sarjana muda pada suatu perguruan tinggi;

**Diploma IV/S1** adalah tamat program pendidikan diploma IV, sarjana pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi;

**S2/S3** adalah tamat program pendidikan pasca sarjana, doktor, spesialis 1 dan 2 pada suatu universitas/institut/sekolah tinggi,

- **Kemampuan Membaca dan Menulis**

Huruf latin, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin, misalnya kalimat "Anda harus berlaku adil";

**Huruf lainnya**, bila responden hanya dapat membaca dan menulis selain huruf latin, misalnya huruf arab, cina dan sebagainya;

**Huruf latin dan huruf lainnya**, bila responden dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya;

**Tidak dapat**, bila responden tidak dapat membaca dan menulis, baik huruf latin maupun huruf lainnya,

**Dapat membaca dan menulis** artinya dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu,

**Angka Melek Huruf**, proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya,

**Angka Partisipasi Sekolah**, proporsi dari keseluruhan penduduk dari berbagai kelompok usia tertentu (7-12, 13-15, 16-18 dan 19-24) yang masih duduk di bangku sekolah,

**Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**, menggambarkan lamanya pendidikan yang ditempuh, dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan,

**Angka Partisipasi Sekolah (APS)**, adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah dibandingkan dengan penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu,

**Angka Partisipasi Murni (APM)**, adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya penduduk usia sekolah (PUS) yang bersekolah tepat waktu.



2

# PENDIDIKAN MERATA dan BERKUALITAS

Tantangan Pembangunan Pendidikan | Monitoring Pemerataan Pendidikan



*"tiap-tiap Warga Negara  
berhak mendapat Pengajaran"*

- UUD 1945 Pasal 31

*"Menjamin kualitas pendidikan  
yang inklusif dan merata serta  
meningkatkan kesempatan be-  
lajar sepanjang hayat untuk  
semua."*

- SDGs Tujuan 4



## PENDIDIKAN MERATA DAN BERKUALITAS

*"Kulit dari pendidikan itu memang pahit, namun buahnya sangatlah manis dan aromanya wangi"*  
- Anonim

### Tantangan Pembangunan Pendidikan: Pendidikan yang Berkualitas dan Merata

Terciptanya lingkungan yang memungkinkan masyarakat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif merupakan tujuan utama pembangunan. Semakin tinggi kualitas hidup manusia maka semakin banyak pilihan yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pilihan-pilihan tersebut, dengan pendidikan manusia mampu mengembangkan potensi diri dan meningkatkan kemampuan dalam mengatasi hambatan. Konsep pembangunan manusia menyebut jika manusia bukanlah alat pembangunan melainkan tujuan akhir, sehingga memperoleh pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap manusia. Di Indonesia, pemenuhan hak untuk memperoleh pendidikan tercantum dalam Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 31 (Amandemen IV), ayat pertama yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran.

Tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan adalah kualitas dan pemerataan pendidikan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 menyebutkan tantangan yang dihadapi pembangunan pendidikan adalah menyediakan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan jumlah proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunkan jumlah penduduk yang buta aksara, serta menurunkan kesenjangan tingkat pendidikan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat, termasuk antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk perkotaan dan perdesaan, antara

penduduk di wilayah maju dan tertinggal, dan antar jenis kelamin. Tantangan lainnya adalah meningkatkan kualitas dan relevansi termasuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antar daerah, antar jenis kelamin, dan antara penduduk kaya dan miskin.

Untuk mewujudkan cita-cita yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa maka pendidikan yang merata dan berkualitas menjadi syarat mutlak. Pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi umur, tempat, dan waktu. Implikasinya, pemerintah bertugas menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional dengan strategi dan kebijakan pembangunan pendidikan yang menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis.

### **Indikator Pendidikan sebagai Monitoring Pemerataan Pendidikan**

Untuk melihat sejauh mana pemerataan pendidikan telah berlangsung, pengukuran dan penghitungan indikator-indikator pendidikan perlu untuk dilakukan. Sejauh ini, indikator-indikator pendidikan yang digunakan hanya mampu untuk mengukur pencapaian partisipasi sekolah penduduk yang didisagregasi menurut jenis kelamin, status ekonomi, dan daerah tempat tinggal. Sementara ukuran yang mampu menggambarkan kualitas pendidikan masih menjadi tantangan.

*Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menggunakan *Programme for International Student Assessment (PISA)* sebagai alat untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. Program internasional yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali ini bertujuan untuk memonitor literasi membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains yang diperuntukkan siswa 15 tahun dengan maksud mengevaluasi dan meningkatkan metode pendidikan di suatu negara. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dia lakukan (aplikasi) dengan pengetahuannya. Hasil PISA tahun 2015 menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan di Indonesia sebesar 395 poin, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sehingga mengangkat posisi Indonesia menjadi peringkat 62 dari 72 negara. Pada tahun 2016, dengan

mengadopsi PISA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan program penilaian mutu pendidikan berskala nasional yang dinamakan Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI). Kegiatan ini merupakan program pemetaan capaian pendidikan untuk memantau mutu pendidikan secara nasional/daerah yang menggambarkan pencapaian kemampuan siswa yang dilakukan melalui survei yang sifatnya longitudinal. Kompetensi yang diukur diantaranya matematika, membaca, dan sains.

Penyusunan publikasi "Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2018" bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci dan menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia pendidikan di Provinsi Papua. Ada tiga aspek yang disajikan dalam publikasi ini yaitu prasarana pendidikan, partisipasi pendidikan, serta hasil dan capaian proses pendidikan. Data yang disajikan bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018 serta data sekunder Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua tahun ajaran 2017/2018, yang didisagregasi menurut jenis kelamin dan daerah tempat tinggal, sehingga dapat dilihat sejauh mana pemerataan pendidikan sudah berlangsung di Papua.

Publikasi ini disusun dalam enam bab. Bab pertama berisi metode pengumpulan data, cakupan sampel, metode analisis, dan konsep definisi. Bab kedua menyajikan pembahasan mengenai pendidikan merata dan berkualitas. Bab ketiga adalah sarana dan prasarana pendidikan. Selanjutnya, pada bab empat menggambarkan kondisi partisipasi sekolah. Bab lima disajikan hasil dan capaian proses pendidikan yaitu pendidikan tertinggi yang ditamatkan, rata-rata lama sekolah, dan angka melek huruf. Pada bab enam disajikan hasil dari kondisi sosial budaya dan pendidikan.

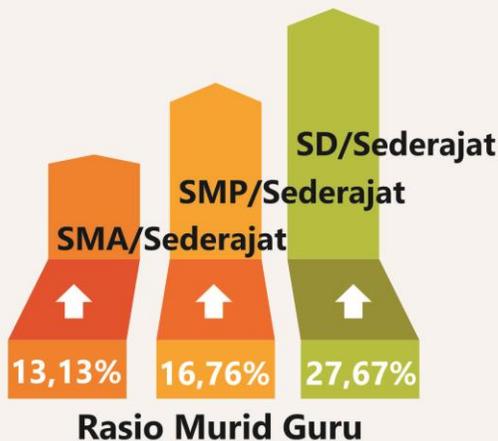
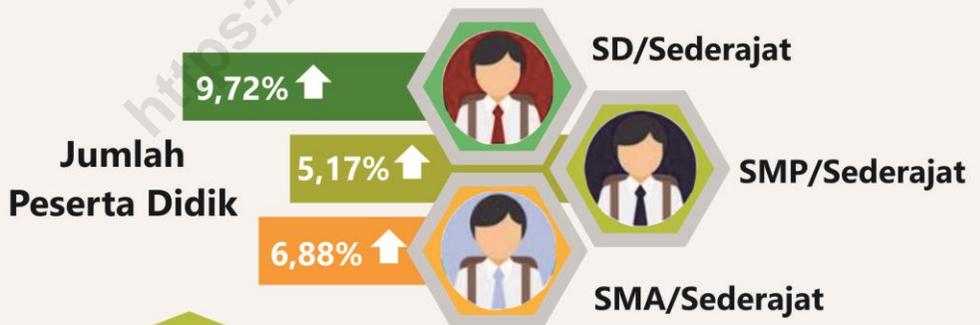
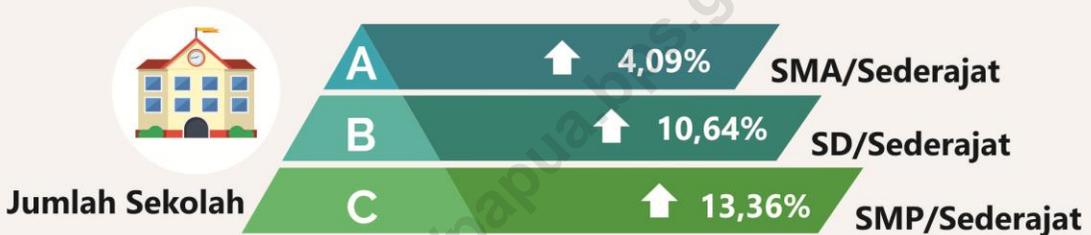
Beberapa indikator pendidikan pada tingkat kabupaten/kota disajikan dalam halaman lampiran. Hanya saja ada beberapa indikator yang tidak dapat disajikan pada tingkat kabupaten/kota dikarenakan keterwakilan sampel yang tidak mencukupi. Penjelasan tersebut disajikan dalam catatan teknis.



3

# SARANA dan PRASARANA PENDIDIKAN

Jumlah Sekolah | Jumlah Peserta Didik | Rasio Murid Guru



## SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

*"Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup, ia adalah hidup itu sendiri."  
– John Dewey*

Pasal 45 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menerangkan setiap satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Sarana pendidikan merupakan media atau alat material yang berperan dalam kegiatan belajar mengajar secara langsung, seperti perabot (kursi dan meja), peralatan pendidikan (alat peraga), dan media pendidikan (papan tulis). Sementara prasarana pendidikan berperan secara tidak langsung seperti ruang kelas dan perpustakaan (Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007).

### Jumlah Sekolah dan Peserta Didik

Perkembangan jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan di Provinsi Papua pada tahun ajaran 2016/2017 dan 2017/2018 mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding pada tahun ajaran sebelumnya. Jenjang pendidikan SD/ sederajat mengalami kenaikan sebesar 10,64 persen, begitu pula dengan jenjang SMP/ sederajat juga mengalami kenaikan sebesar 13,36 persen yang pada tahun ajaran sebelumnya kedua jenjang tersebut mengalami penurunan. SMA/ sederajat di tahun ajaran 2017/2018 mengalami kenaikan sebesar 4,09 persen. Data perkembangan jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan lebih lengkapnya terdapat pada Tabel 3.1

**Tabel 3.1****Perkembangan Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018**

Jenjang Pendidikan	2016/2017	2017/2018	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/Sederajat	2 236	2 474	10,64
SMP/Sederajat	569	645	13,36
SMA/Sederajat	342	356	4,09

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Pertumbuhan jumlah sekolah ini dimungkinkan karena beberapa alasan, seperti sistem zonasi yang mengharuskan minimal memudahkan calon siswa untuk mengakses pendidikan di wilayah domisilinya, sehingga membuat pemerintah membangun sekolah untuk memudahkan akses pendidikan kepada masyarakat dan beberapa alasan lainnya, tentunya hal ini diharapkan mampu membuat kualitas pendidikan di Papua semakin baik. Pertumbuhan jumlah sekolah diikuti pula dengan pertumbuhan jumlah peserta didik menurut jenjang pendidikannya yang juga mengalami pertumbuhan seperti pada Tabel 3.2

**Tabel 3.2****Perkembangan Jumlah Peserta Didik Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018**

Jenjang Pendidikan	2016/2017	2017/2018	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ sederajat	408 762	448 483	9,72
SMP/ sederajat	120 260	126 477	5,17
SMA/ sederajat	87 130	93 127	6,88

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Pertumbuhan positif jumlah peserta didik menurut jenjang pendidikan seperti pada Tabel 3.2 mengindikasikan semakin baiknya pemahaman masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Pertumbuhan jumlah peserta didik terbesar ada pada jenjang pendidikan SD/ sederajat yang tumbuh sebesar 9,72 persen; diikuti jenjang pendidikan SMA/ sederajat sebesar 6,88 persen; dan jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 5,17 persen. Pertumbuhan positif jumlah sekolah dan jumlah peserta didik

diikuti pula dengan pertumbuhan positif jumlah guru disemua jenjang pendidikan dibanding tahun ajaran sebelumnya, seperti yang tertuang pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3**

**Perkembangan Jumlah Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2016/2017 dan 2017/2018**

Jenjang Pendidikan	2016/2017	2017/2018	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ sederajat	15 108	16 208	7,28
SMP/ sederajat	6 764	7 547	11,58
SMA/ sederajat	6 108	7 094	16,14

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan jumlah guru di Papua pada tahun ajaran 2017/2018 dibandingkan tahun ajaran sebelumnya. Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah guru yang paling tinggi adalah pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat yaitu sebesar 16,14 persen berbanding terbalik dengan pertumbuhan peserta didiknya, meskipun hal ini bisa juga mengindikasikan menyiapkan guru berkualitas dulu baru kemudian diikuti peserta didik akan meningkat pula. Dengan kata lain, meningkatnya jumlah peserta didik pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat didukung dengan peningkatan jumlah guru pada jenjang yang sama.

Jumlah guru SMP/ sederajat dan SD/ sederajat mengalami pertumbuhan positif yaitu masing-masing sebesar 11,58 persen dan 7,28 persen pada tahun ajaran 2017/2018. Meskipun peningkatan jumlah guru belum sebanding dengan peningkatan jumlah peserta didik, adanya pertumbuhan jumlah guru yang positif tersebut menunjukkan bahwa arah pembangunan pendidikan sudah berada pada jalur yang benar.

## Rasio Murid Guru

Rasio murid guru adalah perbandingan antara jumlah murid terhadap jumlah guru (baik guru layak mengajar maupun tidak) pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru mencerminkan rata-rata jumlah murid yang dihadapi oleh satu orang guru. Artinya indikator ini mampu menunjukkan beban kerja guru pada setiap jenjang pendidikan tertentu. Rasio murid guru pada Tabel 3.4 menunjukkan pertumbuhan positif dibanding dengan tahun ajaran sebelumnya.

**Tabel 3.4**

**Jumlah Murid, Guru, dan Rasio Murid Guru Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2017/2018**

Jenjang Pendidikan	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid Guru
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ sederajat	448 483	16 208	27,67
SMP/ sederajat	126 477	7 547	16,76
SMA/ sederajat	93 127	7 094	13,13

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua

Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua menunjukkan bahwa pada tahun ajaran 2017/2018 rasio murid guru pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 27,67; jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 16,76; dan rasio murid guru pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 13,13 persen. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 tentang Guru menetapkan standar ideal rasio murid guru pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 20:1 sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat sebesar 15:1 dan pada jenjang SMA/ sederajat sebesar 12:1. Semakin besar angka rasio murid guru mengindikasikan beban kerja guru yang semakin besar karena harus bertanggung jawab terhadap banyak murid. Dengan kata lain, semakin besar rasio murid guru, semakin kecil akses murid terhadap guru. Berdasarkan Tabel 3.4 rasio murid guru SD/ sederajat menunjukkan angka sebesar 27,67, yang dapat diartikan bahwa satu orang guru SD/ sederajat di Papua harus bertanggung jawab terhadap 27-28 orang murid SD/ sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat sedikit kelebihan beban kerja guru SD di Papua.

Sementara itu, UNESCO (2009) mengasumsikan bahwa rasio murid guru yang rendah menandakan kelas yang lebih kecil. Dari Tabel 3.4 terlihat bahwa rasio murid guru pada jenjang

pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat masing-masing lebih dari standar ideal yang ditetapkan oleh pemerintah, namun masih dapat dikatakan bahwa kelas untuk jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat di Papua adalah kelas kecil karena nilai yang tidak terpaut jauh dari standar. Hal ini dipandang cukup baik karena memungkinkan guru untuk lebih memperhatikan murid secara individu sehingga diharapkan mampu mendukung prestasi muridnya menjadi lebih baik. Sementara itu,

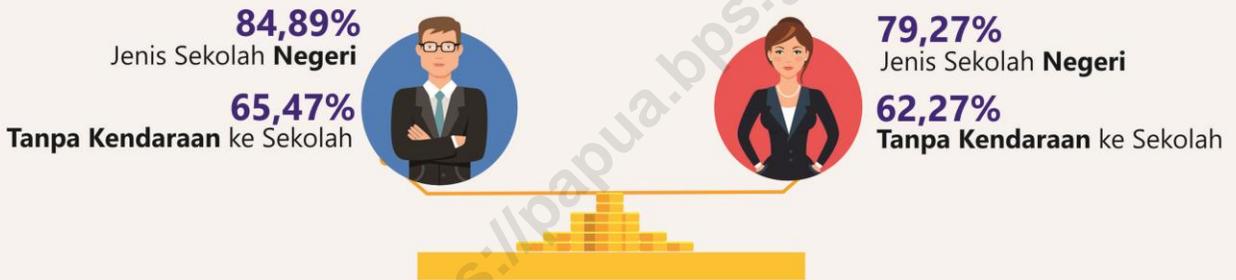
<https://papua.bps.go.id>



# 4

# PARTISIPASI SEKOLAH

Pendidikan Anak Usia Dini | Angka Kesiapan Sekolah | Partisipasi Sekolah | Angka Partisipasi Kasar  
 Angka Partisipasi Murni | Rasio Angka Partisipasi Murni | Sekolah dan Sarana Transportasi



## - Angka Partisipasi Sekolah -



“8 dari 10 anak usia 7-12 tahun bersekolah sesuai jenjangnya yaitu SD/Sederajat”

# 4

## PARTISIPASI SEKOLAH

*"Tujuan utama dari pendidikan adalah mengubah Jendela menjadi Pintu."  
– Rita Widyasari*

Pendidikan merupakan pilar utama dalam proses pembangunan di Indonesia, sesuai dengan Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 alinea keempat menyebutkan salah satu cita-cita negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 UUD 1945 menjabarkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib mengusahakan untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan berkualitas bahkan menjadi komitmen global sebagaimana yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) poin keempat yaitu menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, program pendidikan di Indonesia menjadi prioritas dalam Kabinet Kerja 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam agenda Nawacita yang kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan Program Indonesia Pintar. Program pendidikan diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal yang diselenggarakan melalui sistem pendidikan yang terbuka, demokratis, dan berkesetaraan gender, untuk menjamin bahwa pendidikan dapat menjangkau masyarakat di daerah terpencil serta yang memiliki kendala ekonomi dan sosial.

Pemenuhan hak seluruh warga negara untuk setidaknya menyelesaikan pendidikan dasar, yang ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah merupakan sasaran utama pembangunan bidang pendidikan sesuai tujuan strategis Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019, dengan target sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebagai berikut.

- APK PAUD usia 3-6 tahun sekurang-kurangnya 78,70 persen;
- AMH penduduk usia dewasa di atas 15 tahun sekurang-kurangnya 96,10 persen;
- APK SD/SDLB/Paket A sekurang-kurangnya 100,55 persen;
- APM SD/SDLB sekurang-kurangnya 85,20 persen;
- APK SMP/SMPLB/Paket B sekurang-kurangnya 83,77 persen;
- APM SMP/SMPLB sekurang-kurangnya 73,72 persen;
- APK SMA/SMK/SMLB/Paket C sekurang-kurangnya 85,71 persen;
- APM SMA/SMK/SMLB sekurang-kurangnya 67,50 persen;
- Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun sebesar 8,8 tahun.

Partisipasi sekolah menggambarkan efektivitas program pendidikan dalam menyerap potensi pendidikan yang ada di masyarakat. Berbagai indikator partisipasi sekolah tersebut dapat digunakan untuk memantau sejauh mana program pendidikan pemerintah telah mencapai targetnya. Semakin tinggi capaian indikator-indikator tersebut, semakin efektif program pendidikan yang dijalankan. Data Susenas 2018 dapat menyajikan berbagai indikator yang diperlukan untuk memantau kinerja program pendidikan seperti indikator partisipasi sekolah pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

### **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

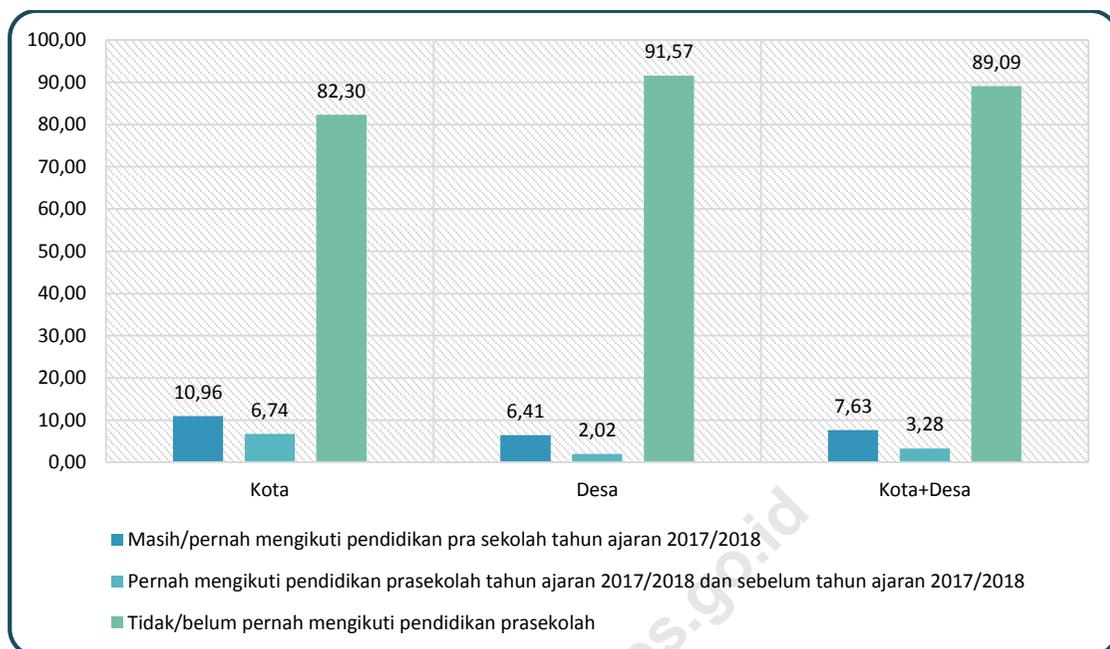
Secara umum tujuan program pendidikan anak usia dini (pra sekolah) adalah agar semua anak usia dini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan tumbuh kembang secara optimal guna meningkatkan kecerdasan yang dimilikinya. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Munculnya program ini tidak lepas dari kesadaran bahwa usia dini (anak yang baru dilahirkan sampai usia enam tahun) merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sujiono (2009) bahwa usia dini merupakan usia di mana anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, atau disebut sebagai usia emas (Rapi, tanpa tahun). Dryden dan Vos (1999) juga menyatakan bahwa 50 persen kemampuan belajar anak ditentukan dalam empat tahun pertamanya dan 30 persen sebelum mencapai usia delapan tahun. Pendidikan pra sekolah juga merupakan modal pendidikan dalam rangka persiapan untuk mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya.

Pendidikan pra sekolah (selanjutnya disebut PAUD) diselenggarakan melalui jalur formal, bukan formal, maupun informal. PAUD formal seperti Taman Kanak-kanak (TK), Raudhotul Atfal (RA), dan bentuk lain yang sederajat; PAUD bukan formal seperti Kelompok Bermain (KB/*Play Group*), Tempat Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat; sedangkan PAUD informal diperoleh melalui orang tua, keluarga, atau lingkungan. Melalui PAUD, diberikan pendidikan, perawatan, dan pengembangan anak secara terpadu, sehingga diharapkan masa tersebut dapat secara optimal dikembangkan.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur capaian partisipasi penduduk dalam pendidikan anak usia dini, di antaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD yang didefinisikan sebagai jumlah anak yang terdaftar dalam pendidikan usia dini tanpa memandang usia, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi dalam kelompok usia yang relevan. Dalam publikasi ini APS PAUD dinyatakan sebagai persentase penduduk usia 0-6 tahun yang masih mengikuti atau pernah mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun ajaran bersangkutan.

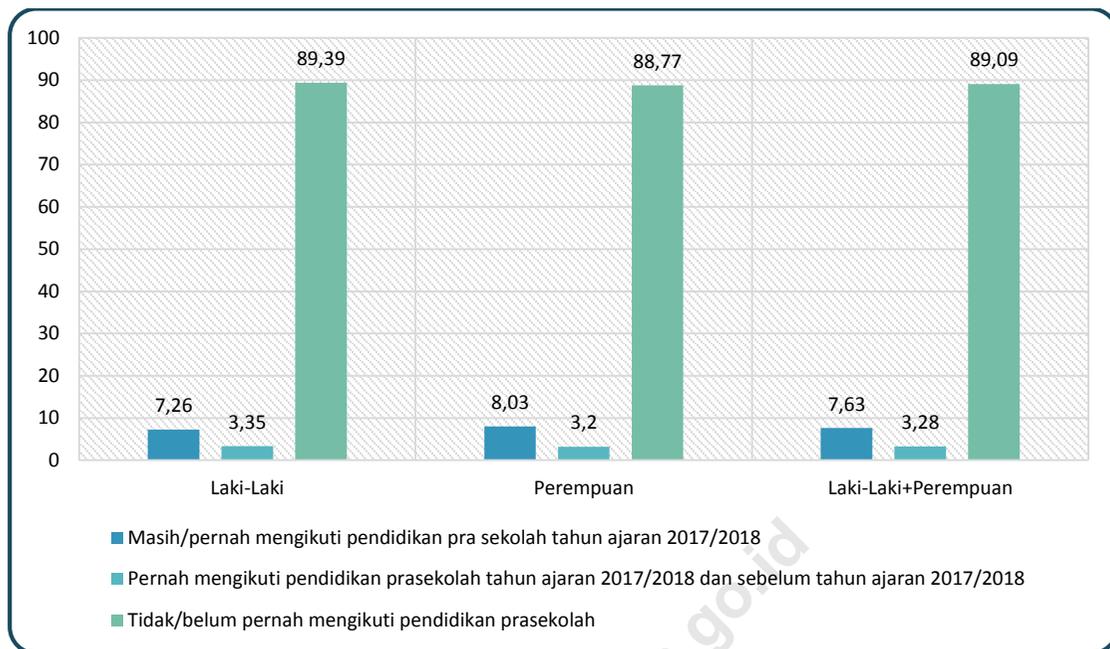


**Gambar 4.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 0-6 Tahun Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018**

Sumber: Susenas 2018 (diolah)

Capaian APS PAUD usia 0-6 tahun di Papua pada tahun 2018 masih rendah. Data Susenas menunjukkan bahwa sebesar 89 persen anak usia 0-6 tahun di Papua tidak/belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah. APS PAUD 0-6 tahun berdasarkan Gambar 4.1 hanya sebesar 7,63 persen. Ini berarti bahwa dari 100 anak usia 0-6 tahun ada sebesar 7-8 anak yang masih atau pernah mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun ajaran 2017/2018. Sementara itu, sebesar 3,28 persen di antaranya pernah mengikuti pendidikan pra sekolah tahun ajaran 2017/2018 dan sebelum tahun ajaran tersebut.

Menurut daerah tempat tinggal, capaian APS PAUD di daerah perkotaan meskipun turun dibanding tahun sebelumnya tapi masih tergolong lebih tinggi daripada perdesaan sebagaimana terlihat pada Gambar 4.1. APS PAUD 0-6 tahun di perkotaan mencapai 10,96 persen sedangkan di perdesaan hanya sebesar 6,41 persen naik dibanding tahun ajaran sebelumnya. Anak 0-6 tahun di daerah perdesaan yang tidak atau belum pernah mengikuti pendidikan pra sekolah bahkan mencapai 91,57 persen.



**Gambar 4.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD 0-6 Tahun Menurut Jenis Kelamin, 2018**

Sumber: Susenas 2018 (diolah)

Selanjutnya, berdasarkan Gambar 4.2, capaian APS PAUD Tahun 2018 di Papua untuk anak perempuan sedikit lebih tinggi daripada anak laki-laki. Pada tahun 2018, sebesar 8,03 persen anak perempuan usia 0-6 tahun masih/pernah mengikuti pendidikan pra sekolah tahun ajaran 2017/2018, sementara anak laki-laki sebesar 7,26 persen.

Dari gambaran di atas terlihat bahwa capaian APS PAUD 0-6 tahun di Papua masih sangat jauh dari target yang ingin dicapai secara nasional. Padahal banyak manfaat yang diperoleh salah satunya adalah mengoptimalkan kemampuan anak pada masa tersebut sehingga anak sudah siap untuk masuk ke dalam jenjang pendidikan formal yaitu pendidikan dasar. Hal ini tentunya menjadi tantangan ekstra bagi pihak terkait untuk selalu membenahi proses dan kualitas pendidikan terutama untuk usia 0-6 tahun, karena proses pra sekolah merupakan langkah awal pembentukan pola pikir dan mempersiapkan anak sebelum melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi.

Jenis pendidikan pra sekolah yang paling banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun di Papua pada tahun 2018 adalah Taman Kanak-kanak (TK)/Bustanul Athfal (BA)/Raudatul Athfal (RA). Tabel 4.1

menunjukkan bahwa partisipasi pra sekolah di TK/BA/RA sebesar 79,83 persen. Selanjutnya 19,85 persen anak usia 0-6 tahun mengikuti PAUD dan Kelompok Bermain, dan hanya sebesar 0,32 persen saja yang masih atau pernah memperoleh pendidikan usia dini di Taman Penitipan Anak (TPA).

**Tabel 4.1**

**Jenis Pendidikan Pra Sekolah Menurut Daerah Tempat Tinggal, 2018**

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Pendidikan Pra Sekolah		
	TK/BA/RA	PAUD/KB	TPA
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	88,16	11,51	0,33
Perdesaan	71,51	28,17	0,31
<b>Total</b>	<b>79,83</b>	<b>19,85</b>	<b>0,32</b>

Sumber: Susenas 2018

Meskipun berbeda secara daerah tempat tinggal, namun untuk jenis pendidikan pra sekolah tidak terlalu berbeda pilihannya. TK/BA/RA merupakan jenis pendidikan pra sekolah yang paling banyak diikuti oleh penduduk 0-6 tahun yang tinggal di perkotaan dan perdesaan, meskipun persentasenya terlihat lebih tinggi di daerah perkotaan sebesar 88,16 persen penduduk 0-6 tahun dan di daerah perdesaan hanya sebesar 71,51 persen, keduanya meningkat dibanding tahun sebelumnya. Selanjutnya persentase masyarakat yang masih/pernah mengikuti pendidikan pra sekolah di PAUD/Kelompok Bermain (KB) di perdesaan lebih tinggi (28,17 persen) daripada daerah perkotaan yaitu sebesar 11,51 persen. Hal ini dapat disebabkan karena fasilitas pendidikan pra sekolah yang paling banyak dijumpai di daerah perdesaan adalah sekolah PAUD sedangkan sekolah TK biasanya dapat dijumpai di ibukota-ibukota kabupaten saja.

**Angka Kesiapan Sekolah (AKS)**

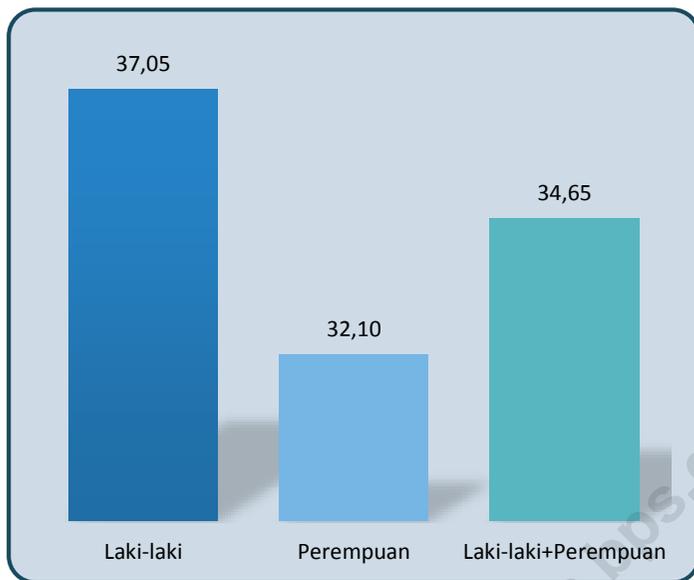
Peningkatan partisipasi sekolah anak usia dini merupakan salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kualitas Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan anak bersekolah formal sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas Wajar 12 Tahun. Menurut penelitian, keterlibatan anak pada pendidikan prasekolah mampu

menentukan kesiapan anak untuk memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. *National Education Goals Panel* menyebutkan bahwa kesiapan bersekolah dan belajar anak meliputi lima dimensi, yaitu: 1) kesehatan fisik dan perkembangan motorik; 2) perkembangan sosial dan emosional; 3) perkembangan bahasa; 4) pendekatan untuk belajar; 5) kognitif dan pengetahuan umum. Keberadaan PAUD dirasa mampu memenuhi beberapa aspek kompetensi tersebut. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa kesiapan anak untuk duduk di bangku SD/ sederajat tidak hanya berdasarkan kesiapan dari sisi anak semata namun juga dukungan dari orang tua dan lingkungan keluarga tempat anak tumbuh dan berkembang.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan anak dalam memasuki jenjang pendidikan dasar adalah Angka Kesiapan Sekolah (AKS). Indikator ini juga dapat menunjukkan kapasitas wilayah dalam mempersiapkan anak sebelum memasuki pendidikan dasar. AKS didefinisikan sebagai jumlah anak yang terdaftar pada jenjang SD/ sederajat kelas 1 yang tahun ajaran sebelumnya mengikuti pendidikan pra sekolah, yang dinyatakan sebagai persentase dari populasi anak yang bersekolah di kelas 1 jenjang SD/ sederajat. Nilai AKS berkisar antara 0 hingga 100 persen. Semakin tinggi nilai AKS maka semakin banyak anak usia kelas 1 SD yang telah disiapkan sebelumnya melalui pendidikan pra sekolah.

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa AKS Papua pada tahun 2018 sebesar 34,65 persen, yang berarti di antara 100 anak yang bersekolah kelas 1 di jenjang pendidikan SD/ sederajat pada tahun ajaran 2017/2018, terdapat 34-35 anak yang telah mengikuti pendidikan pra sekolah pada tahun ajaran sebelumnya. Data Susenas juga menunjukkan adanya perbedaan kesiapan sekolah antara laki-laki dan perempuan yang ditunjukkan oleh capaian AKS di atas. Kesiapan sekolah memasuki pendidikan dasar anak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh capaian AKS laki-

laki sebesar 37,05 persen, sedangkan capaian AKS perempuan sebesar 32,10 persen. Ini berarti laki-laki lebih banyak yang telah disiapkan terlebih dahulu untuk memasuki jenjang pendidikan formal



**Gambar 4.3 Angka Kesiapan Sekolah (AKS) Menurut Jenis Kelamin, 2018**

dibandingkan perempuan. Secara umum, capaian AKS di Papua masih cukup rendah yang dapat disebabkan oleh rendahnya partisipasi pra sekolah di provinsi ini.

### Partisipasi Sekolah

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan pembangunan, bahkan Solow menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan

terakselerasi dan senantiasa meningkat akibat adanya modal manusia seperti pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan nutrisi yang tinggi (Pasay, Handayani, Indrayanti, 2016). Pemerintah telah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati pendidikan dasar dengan membangun fasilitas seperti sarana dan prasarana pendidikan, bahkan berbagai program pendidikan gratis pada tingkat dasar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari partisipasi sekolah penduduk.

Pada tahun 2018, partisipasi sekolah penduduk 5 tahun ke atas di Papua sebesar 24,91 persen atau dengan kata lain dari 100 penduduk berumur lima tahun ke atas di Papua terdapat 24-25 yang masih bersekolah seperti pada Tabel 4.2. Selanjutnya, sebesar 46,72 persen tidak bersekolah lagi dan terdapat 28,37 persen penduduk usia lima tahun ke atas yang belum/tidak pernah sekolah. Penduduk lima tahun ke atas yang masih bersekolah di Papua menunjukkan penurunan dibanding tahun

sebelumnya, tentu ini menjadi bahan evaluasi selanjutnya. Tabel 4.2 juga menunjukkan bahwa kecenderungan penduduk yang tinggal di daerah perkotaan untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan lebih tinggi daripada penduduk di daerah perdesaan. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya persentase penduduk perkotaan masih bersekolah yang lebih tinggi (28,48 persen) daripada penduduk di perdesaan (23,55 persen). Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sebesar 37,39 persen penduduk usia lima tahun ke atas di perdesaan tidak/belum pernah mengecap bangku pendidikan. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan yang hanya sebesar lima persen.

**Tabel 4.2**

**Partisipasi Sekolah Penduduk 5 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2018**

Karakteristik Demografi	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	28,37	24,91	46,72
<b>Daerah Tempat Tinggal</b>			
Perkotaan	4,80	28,48	66,72
Perdesaan	37,39	23,55	39,06
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	24,83	25,28	49,89
Perempuan	32,32	24,51	43,17
<b>Kelompok Umur</b>			
5 – 6 tahun	80,75	19,25	0,00
7 – 12 tahun	16,70	82,43	0,87
13 – 15 tahun	14,24	80,00	5,76
16 – 18 tahun	17,19	63,48	19,32
19 -24 tahun	16,86	23,37	59,77
<b>Total 5 – 24 tahun</b>	23,27	57,63	19,09

Sumber: Susenas 2018

Sementara itu, kesenjangan partisipasi sekolah terlihat juga antara penduduk laki-laki dan perempuan. Secara umum, partisipasi sekolah penduduk laki-laki lebih baik daripada perempuan. Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebesar 25,28 persen laki-laki masih bersekolah sementara perempuan sebesar 24,51 persen. Selanjutnya, meskipun tidak terlalu jauh perbedaannya, persentase penduduk

perempuan lima tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah masih lebih tinggi (32,32 persen) daripada penduduk laki-laki (24,83 persen).

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai partisipasi sekolah penduduk, penduduk dibagi ke dalam lima kelompok menurut usia ideal sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan, yaitu pra sekolah (5-6 tahun); SD/ sederajat (7-12 tahun); SMP/ sederajat (13-15 tahun); SMA/ sederajat (16-18 tahun); dan Perguruan Tinggi (19-24 tahun). Tabel 4.2 menunjukkan bahwa partisipasi sekolah penduduk semakin menurun seiring peningkatan jenjang pendidikan.

Sebagaimana yang ditunjukkan tabel di atas, persentase penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 82,43 persen, namun pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi persentase penduduk yang masih sekolah semakin rendah yaitu sebesar 80 persen pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat; sebesar 63,48 persen pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat; dan hanya mencapai 23,67 persen saja pada pendidikan tinggi. Tingginya persentase penduduk 19-24 tahun yang tidak bersekolah lagi dapat disebabkan karena putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, masuk dunia kerja, dsb. Selain itu, tabel di atas juga menunjukkan bahwa persentase penduduk usia sekolah (5-24 tahun) yang tidak/belum pernah sekolah di Papua masih cukup besar yaitu sebesar 23,27 persen dan persentase penduduk yang tidak bersekolah lagi sebesar 19,09 persen. Kedua kelompok ini yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah.



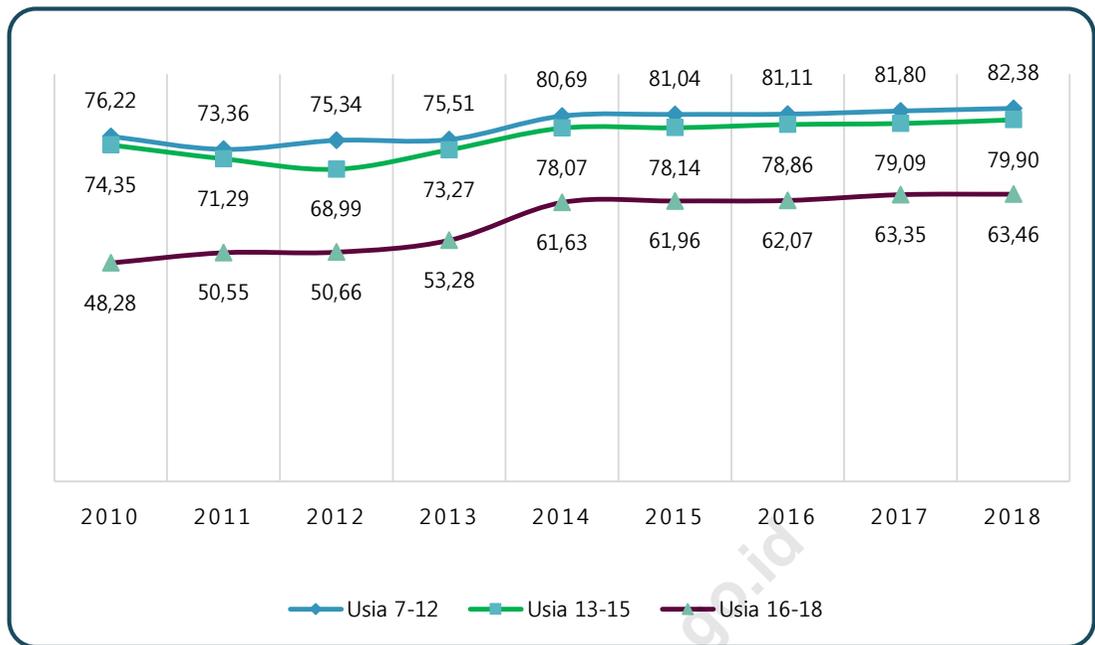
**Gambar 4.4 Partisipasi Sekolah Penduduk 7-24 Tahun 2016-2018**

Pendidikan penduduk pada kelompok usia 7-24 tahun memiliki peran yang besar dalam pembangunan karena mereka akan terlibat dalam kegiatan ekonomi aktif, sehingga pendidikan yang berkualitas harus dinikmati setiap penduduk pada kelompok umur tersebut, sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas yang siap digunakan sebagai modal pembangunan. Sayangnya, data Susenas yang tergambar di Gambar 4.4 menunjukkan bahwa masih ada sekitar 16,40 persen penduduk pada rentang usia tersebut yang tidak atau belum pernah menikmati bangku pendidikan. Begitu pula partisipasi penduduk yang masih sekolah juga mengalami penurunan menjadi 62,22 persen atau dengan kata lain pembangunan pendidikan di Papua mengalami penurunan dalam hal meningkatkan partisipasi sekolah penduduknya. Hal ini berbanding terbalik dengan partisipasi penduduk yang tidak bersekolah lagi mengalami penurunan meskipun tidak terlalu signifikan perbedaannya.

Menurut kabupaten/kota, partisipasi sekolah penduduk 7-24 tahun yang tinggal kabupaten-kabupaten yang berada di wilayah pegunungan jauh lebih rendah dibandingkan mereka yang berada di wilayah pesisir. Data Susenas tahun 2018 (lampiran) menunjukkan bahwa persentase penduduk 7-24 tahun yang tidak/belum pernah sekolah di Kabupaten Puncak merupakan yang tertinggi (59,38

persen) meningkat dibanding tahun 2017, sementara yang paling rendah adalah di Kota Jayapura yaitu sebesar 1,13 persen. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir yang jauh lebih baik dibandingkan masyarakat pegunungan, fasilitas pendidikan yang lebih banyak tersedia di wilayah pesisir utamanya daerah perkotaan, dan akses di wilayah pesisir yang jauh lebih mudah dibandingkan wilayah pegunungan. Secara umum, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi sekolah penduduk di Papua masih cukup rendah terutama untuk pendidikan menengah dan tinggi. Pembangunan infrastruktur daerah termasuk fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan dirasa masih sangat diperlukan untuk meningkatkan akses dan kesempatan masyarakat di pegunungan untuk menikmati pendidikan sebagaimana yang sudah dinikmati oleh masyarakat pesisir pada umumnya.

Indikator ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk umur sekolah adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Indikator ini juga dapat digunakan untuk melihat struktur kegiatan penduduk terkait kegiatan sekolah, dan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu, yaitu kelompok umur 7-12 tahun; 13-15 tahun; dan 16-18 tahun. Nilai APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk umur tertentu. Gambar 4.5 menunjukkan perkembangan capaian APS menurut kelompok umur di Provinsi Papua kurun waktu 2010-2018. Tahun 2018 yang mengalami peningkatan capaian APS pada semua kelompok umur, dengan kata lain terjadi peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan di Papua selama kurun waktu delapan tahun terakhir. Dari Gambar 4.5 juga terlihat bahwa selama kurun waktu 2018, pemerintah pusat maupun daerah berhasil meningkatkan APS 7-12 tahun menjadi sebesar 82,38 persen; APS 13-15 tahun menjadi sebesar 79,90 persen; dan capaian APS 16-18 tahun menjadi sebesar 63,46 persen.



**Gambar 4.5 Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Umur, 2010-2018**

Sama halnya dengan tahun 2017 pada Gambar 4.5 juga menunjukkan bahwa capaian APS usia 7-12 tahun lebih tinggi dibandingkan kelompok usia 13-15 dan 16-18 tahun. Hal tersebut sejalan dengan persentase partisipasi sekolah penduduk yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa semakin tinggi kelompok umur, kecenderungan masyarakat yang bersekolah semakin rendah.

Peningkatan capaian APS pada kelompok usia 16-18 tahun merupakan yang tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya dikarenakan partisipasi sekolah penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun sudah cukup tinggi sehingga usaha yang dilakukan pemerintah sudah maksimal. Sementara pada kelompok usia 16-18 tahun partisipasi sekolah penduduk masih relatif rendah, sehingga masih banyak peluang kebijakan pembangunan pendidikan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Hasilnya jelas terlihat dari Gambar 4.5, bahwa semua kebijakan pembangunan pendidikan yang dilakukan pemerintah selama ini membuahkan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian, masih diperlukan kerja keras pemerintah untuk mencapai akses pendidikan 100 persen untuk semua lapisan masyarakat.

**Tabel 4.3****Angka Partisipasi Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2018**

Karakteristik Demografi	Angka Partisipasi Sekolah		
	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	82,43	80,00	63,48
<b>Daerah Tempat Tinggal</b>			
<b>Perkotaan</b>	95,85	95,22	84,78
<b>Perdesaan</b>	78,47	74,64	56,08
<b>Jenis Kelamin</b>			
<b>Laki-laki</b>	82,16	80,78	65,67
<b>Perempuan</b>	82,72	79,14	60,87

Sumber: Susenas 2018

Menurut daerah tempat tinggal, capaian APS masyarakat perkotaan secara umum lebih tinggi daripada masyarakat di perdesaan. Hal tersebut terlihat dari Tabel 4.3 di mana pada setiap kelompok usia, capaian APS masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat perdesaan. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa semakin tinggi kelompok usia semakin lebar kesenjangan capaian APS antara daerah perkotaan dan perdesaan. Ada beberapa hal yang diduga sebagai penyebabnya, antara lain dikarenakan fasilitas pendidikan baik infrastruktur maupun sarana prasarana seperti tenaga pengajar belum tersedia di daerah perdesaan, terutama untuk fasilitas pendidikan tinggi seperti SMA/ sederajat.

Kesenjangan capaian APS antara penduduk laki-laki dan perempuan tidak terlalu terlihat. Capaian APS pada masing-masing kelompok usia antara keduanya relatif sama meskipun capaian APS perempuan pada usia 7-12 tahun sedikit lebih tinggi daripada laki-laki. Hal ini merupakan indikasi pemerataan pembangunan yang cukup baik karena sudah responsif gender, artinya laki-laki maupun perempuan sudah memiliki akses yang sama terhadap pendidikan.

### Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan

jenjang pendidikan tersebut. Indikator ini mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya, sebagai contoh, APK SD menunjukkan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah di SD terhadap jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Dengan demikian, nilai APK bisa lebih dari 100 persen, karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Secara umum, APK dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

**Tabel 4.4**

**Angka Partisipasi Kasar Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2018**

Karakteristik Demografi	Angka Partisipasi Kasar		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	94,47	87,81	65,07
<b>Daerah Tempat Tinggal</b>			
Perkotaan	106,94	103,23	110,32
Perdesaan	90,79	82,38	49,34
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	95,43	91,52	67,10
Perempuan	93,44	83,71	62,64

Sumber: Susenas 2018

Capaian APK bervariasi menurut jenjang pendidikan. Data Susenas menunjukkan bahwa capaian APK pada jenjang pendidikan dasar lebih tinggi daripada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Pada tahun 2018, APK SD di Papua secara umum sebesar 94,47 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya; APK SMP sebesar 87,81 juga naik dibanding tahun sebelumnya; kecuali APK SMA sebesar 65,07 yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Capaian APK yang tidak 100

persen mengindikasikan masih ada penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah di atas/bawah jenjang pendidikan yang bersesuaian dengan kelompok usia tersebut.

Menurut jenis kelamin, capaian APK antara laki-laki lebih tinggi dibanding capaian APK perempuan untuk semua jenjang pendidikan, terutama pada APK jenjang SD dimana jenis kelamin laki-laki mencapai sebesar 95,43 persen sedangkan perempuan mencapai sebesar 93,44 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa laki-laki cenderung memiliki kesempatan dan akses yang lebih baik daripada perempuan dalam hal melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Selanjutnya menurut daerah tempat tinggal, capaian APK masyarakat perkotaan lebih besar daripada capaian APK di daerah perdesaan, di mana hal tersebut berlaku untuk setiap jenjang pendidikan. Capaian APK daerah perkotaan yang mencapai lebih dari 100 menunjukkan bahwa terdapat anak/murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, berada di luar *range* kelompok umur yang bersesuaian. Capaian APK lebih dari 100 ini hanya terjadi di daerah perkotaan, sebaliknya di daerah perdesaan capaian APK cenderung rendah. Hal ini dapat disebabkan diantaranya oleh fasilitas pendidikan yang banyak tersedia di daerah perkotaan sehingga kesempatan untuk menikmati pendidikan lebih besar di daerah kota. Ini dapat menarik masyarakat termasuk dari perdesaan yang tadinya tidak bersekolah karena tidak ada fasilitas untuk datang bersekolah di kota meskipun umurnya tidak sesuai lagi dengan jenjang pendidikan tertentu. Selain itu, tabel di atas juga menunjukkan bahwa selisih APK perkotaan dan perdesaan meningkat seiring dengan kenaikan jenjang berikutnya. Perbedaan yang paling besar terlihat pada jenjang pendidikan SMA/ sederajat. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa fasilitas atau sarana pendidikan menengah ke atas di Papua masih terpusat di daerah perkotaan, sehingga sulitnya kondisi wilayah di beberapa kabupaten semakin menghambat kesempatan dan akses penduduk untuk bersekolah.

Mengacu pada tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Tahun 2015-2019 yaitu peningkatan partisipasi penduduk usia pendidikan dasar dan menengah, maka sasaran yang ingin dicapai di antaranya adalah APK SD sekurang-kurangnya 100,55 persen; APK SMP sekurang-kurangnya

83,77 persen; dan APK SMA sekurang-kurangnya 85,71 persen. Apabila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018, maka APK SMP telah mencapai standar nasional yang sekurang-kurangnya 83,77 persen, dimana APK SMP Papua telah mencapai 87,81 persen. Sedangkan APK SD dan APK SMA di Papua masih diperlukan kerja pemerintah daerah untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan dan tentunya mempertahankan apa yang telah dicapai pada tahun 2018.

### Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia tersebut. Indikator ini berguna untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya. Dengan kata lain, indikator ini menunjukkan penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. APM akan mencapai 100 persen apabila semua anak usia sekolah bersekolah tepat waktu.

**Tabel 4.5**

#### Angka Partisipasi Murni Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Demografi, 2018

Karakteristik Demografi	Angka Partisipasi Murni		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	79,14	57,09	44,31
<b>Daerah Tempat Tinggal</b>			
Perkotaan	92,47	73,32	69,55
Perdesaan	75,21	51,37	35,55
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-laki	79,46	58,51	45,27
Perempuan	78,81	55,52	43,18

Sumber: Susenas 2018

Data Susenas 2018 pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa pada tahun 2018, APM SD Provinsi Papua sebesar 79,09 persen lebih tinggi daripada APM SMP dan SMA yaitu masing-masing sebesar 57,09 persen dan 44,31 persen. APM SD sebesar 79,09 persen dapat diartikan dari 100 penduduk usia

7-12 tahun terdapat 79 hingga 80 anak 7-12 tahun yang tepat bersekolah di jenjang pendidikan sekolah dasar atau sederajat, selisihnya yaitu sebesar 20,91 persen adalah penduduk yang berusia di luar kelompok umur tersebut namun sedang bersekolah di jenjang pendidikan SD/sederajat.

Menurut daerah tempat tinggal, capaian APM penduduk perkotaan selalu lebih tinggi daripada penduduk perdesaan pada semua jenjang pendidikan SD, SMP, maupun SMA. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh tabel di atas, capaian APM SD masyarakat perkotaan pada tahun 2018 mencapai 92,47 sementara di perdesaan hanya sebesar 75,21 persen. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin besar ketimpangan capaian APM antara penduduk perkotaan dan perdesaan. Banyak faktor yang diduga turut mempengaruhi ketimpangan capaian APM antara penduduk perkotaan dan perdesaan, di antaranya adalah terbatasnya prasarana pendidikan khususnya pendidikan tinggi yang tersedia di perdesaan, sehingga banyak masyarakat yang tidak bersekolah sesuai umur dan jenjang pendidikan yang bersesuaian, maupun budaya masyarakat bahwa anak yang lebih besar harus menjaga adiknya lebih kecil, sehingga tidak melanjutkan pendidikan.

Sama seperti indikator pendidikan yang lain, ketimpangan atas capaian APM laki-laki dan perempuan pada masing-masing jenjang pendidikan memiliki selisih yang tidak terpaut jauh. Meskipun capaian APM laki-laki cenderung lebih tinggi daripada perempuan, kecuali pada jenjang pendidikan SMA/sederajat.

Target yang ingin dicapai pemerintah pada tahun 2019 sebagaimana yang tertuang dalam tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI adalah capaian APM SD sekurang-kurangnya 85,20 persen; APM SMP sekurang-kurangnya 73,72 persen; dan APM SMA sekurang-kurangnya 67,50 persen dari uraian di atas, maka capaian APM pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi Papua pada tahun 2018 belum memenuhi target tersebut. Meskipun demikian, ada 16 kabupaten/kota yang telah mencapai target APM SD sekurang-kurangnya 85,20 persen; ada empat kabupaten/kota yang telah mencapai target APM SMP; namun tidak ada kabupaten yang telah

mencapai target APM SMA pada tahun 2018 ini (lampiran). Apabila kebijakan pembangunan pendidikan tetap menjadi prioritas pemerintah daerah, maka target nasional akan tercapai.

### Rasio Angka Partisipasi Murni

Salah satu tujuan SDGs (*Sustainable Development Goals*) adalah terwujudnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam aspek pendidikan, kesetaraan gender mendukung adanya pemenuhan hak memperoleh pendidikan dasar, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Terwujudnya kesetaraan gender di semua jenjang pendidikan akan meningkatkan status dan kemampuan perempuan dan laki-laki untuk berperan dalam pembangunan ekonomi.

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat disparitas gender dalam aspek pendidikan adalah rasio APM. Rasio APM merupakan persentase APM perempuan terhadap APM laki-laki. Nilai rasio lebih dari 100 menunjukkan APM perempuan lebih besar daripada APM laki-laki. Dengan kata lain, kesetaraan gender sudah terwujud.



**Gambar 4.6 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, 2017-2018**

Rasio angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan pada tahun 2018 pada Gambar 4.6 berdasarkan hasil Susenas menunjukkan penurunan dibanding tahun 2017, terutama pada APM SMA tahun 2018 yang terpaut jauh turunnya dari 102,09 persen pada tahun 2017 menjadi 95,38 persen

pada tahun 2018. Dari gambar tersebut terlihat bahwa rasio APM SD di Papua 2018 sebesar 99,29; rasio APM SMP sebesar 94,89; dan rasio APM SMA sebesar 95,38. Nilai rasio APM SD, SMP dan SMA di bawah 100 menunjukkan bahwa pada tahun 2018, penduduk laki-laki yang bersekolah tepat waktu pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat lebih banyak dibandingkan perempuan.

Pemerintah menargetkan rasio APM SD dan SMP masing-masing sebesar 98 persen, sementara target untuk rasio APM SMA sebesar 95 persen. Dari data Susenas di atas dapat disimpulkan bahwa Provinsi Papua telah mencapai target kesetaraan gender dalam aspek pendidikan khususnya pada pendidikan pada jenjang SD dan SMA.

### **Sekolah dan Sarana Transportasi**

Pembangunan pendidikan bukan tanggung jawab dari pemerintah semata, namun tentunya dari semua pihak termasuk pihak swasta. Sekolah negeri dan swasta pada dasarnya tidak berbeda jauh selain dari pihak yang menaungi, sumber dana, hingga fasilitas sekolah. Tujuan utama tetap sama yaitu sebagai pencetak insan yang berilmu dan berkualitas. Tantangan pembangunan pendidikan ini dapat dilihat dari Tabel 4.6 yang menunjukkan persentase penduduk 5 tahun yang masih bersekolah menurut jenis kelamin dan jenis sekolah. Tentunya ini bisa menjadi bahan acuan untuk melihat proporsi penduduk yang bersekolah di sekolah negeri atau swasta, dengan harapan adanya dukungan dari pihak terkait akan pentingnya pendidikan bagi masyarakat Papua.

Persentase penduduk lima tahun ke atas yang bersekolah di sekolah negeri lebih tinggi (82,37 persen) daripada yang bersekolah di swasta (17,63 persen). Hal ini dapat disebabkan oleh ketersediaan jumlah sekolah negeri di Papua yang lebih tinggi daripada sekolah swasta. Sebagaimana data Kemendikbud<sup>2</sup> tahun 2018 persentase jumlah sekolah SD negeri dibanding swasta sebesar 62,93 persen; sekolah SMP negeri sebesar 72,56 persen; sekolah SMA negeri sebesar 59,11; dan sekolah SMK negeri sebesar 56,49 persen.

---

<sup>2</sup> Dalam Publikasi Statistik Pendidikan 2018, BPS RI

**Tabel 4.6****Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Sekolah, 2018**

Jenis Kelamin	Jenis Sekolah	
	Negeri	Swasta
(1)	(2)	(3)
Laki-Laki	84,89	15,11
Perempuan	79,27	20,73
Total	82,37	17,63

Sumber: Susenas MSBP, 2018

Dari Tabel 4.6 juga tidak terlihat adanya kecenderungan perbedaan preferensi sekolah antara laki-laki dan perempuan. Besarnya persentase penduduk yang bersekolah di sekolah negeri tentunya menjadi tugas pemerintah untuk selalu meningkatkan kualitas pendidikan yang ada saat ini.

Tabel 4.7 menunjukkan sarana transportasi yang biasa digunakan penduduk lima tahun ke atas yang masih bersekolah untuk pulang pergi ke sekolah. Sarana transportasi merupakan sarana penunjang pendidikan. Keterbatasan sarana transportasi dapat menjadi penghambat anak untuk bersekolah terlebih apabila jarak tempuh ke sekolah cukup jauh.

Sebagian besar penduduk lima tahun ke atas masih bersekolah di Provinsi Papua yang menuju sekolah tanpa menggunakan kendaraan sebesar 64,03 persen. Dengan kata lain, lebih dari setengah populasi penduduk usia lima tahun ke atas yang masih bersekolah berangkat ke sekolah berjalan kaki dari rumah menuju sekolahnya. Selanjutnya diikuti oleh sarana transportasi kendaraan pribadi, yaitu sebesar 25,61 persen.

**Tabel 4.7**

**Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Bersekolah Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Sekolah, 2018**

Kategori	Sarana transportasi				Total
	Tanpa kendaraan	Kendaraan pribadi	Kendaraan antar jemput	Kendaraan umum	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Jenis Kelamin</b>					
Laki-laki	65,47	27,19	1,44	5,90	100,00
Perempuan	62,27	23,65	1,15	12,93	100,00
<b>Kelompok Umur</b>					
5 – 6	65,66	24,24	3,03	7,07	100,00
7 – 12	74,53	18,14	1,73	5,61	100,00
13 – 15	72,17	18,37	1,48	7,98	100,00
16 – 18	54,20	33,33	0,27	12,20	100,00
19 – 24	19,57	58,33	0,00	22,10	100,00
25+	4,35	78,26	0,00	17,39	100,00
<b>Total</b>	<b>64,03</b>	<b>25,61</b>	<b>1,31</b>	<b>9,05</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas MSBP, 2018

Kondisi tersebut tidak jauh berbeda antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja, dari tabel tersebut terlihat bahwa preferensi menggunakan kendaraan umum terlihat lebih tinggi pada perempuan. Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa sebesar 12,93 persen perempuan lebih suka menggunakan kendaraan umum ke sekolah dibanding laki-laki yang hanya sebesar 5,90 persen. Sementara itu, menurut kelompok umur, semakin tinggi kelompok umur maka semakin rendah persentase penduduk yang berjalan kaki menuju fasilitas pendidikan. Seperti yang terlihat pada table di atas, pada kelompok umur 19-24 tahun dan 25 tahun ke atas, persentase penduduk yang berjalan kaki masing-masing hanya sebesar 19,57 persen dan 4,35 persen. Ini mengindikasikan bahwa fasilitas pendidikan tinggi hanya tersedia di ibu kota kabupaten atau kota besar saja seperti Kota Jayapura, sehingga sarana transportasi tersedia.

Meskipun terlihat sederhana, ketersediaan sarana transportasi yang layak dan terjangkau sangat penting untuk mendukung kelancaran belajar mengajar siswa. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menyediakan sarana penunjang pendidikan atau fasilitas sekolah yang aksesnya terjangkau oleh siapa saja.

<https://papua.bps.go.id>





# 5

## HASIL DAN CAPAIAN PROSES PENDIDIKAN

*"Kekayaan terbesar sebuah bangsa adalah manusianya bukan sumber daya alamnya"*  
– Anies Baswedan

Salah satu tujuan inti pembangunan menurut Todaro (2006) adalah perbaikan kualitas pendidikan serta perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu dan bangsa secara keseluruhan. Modal manusia merupakan salah satu faktor penentu tercapainya tujuan pembangunan tersebut. sehingga investasi terhadap modal manusia yang tepat dapat meningkatkan produktivitas manusia dan mendorong peningkatan kualitas kehidupan manusia dan negara.

Peningkatan kualitas hidup manusia sudah menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah secara nasional yang tercermin dari agenda prioritas Nawacita ke lima yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program Indonesia Pintar. Pada RPJMN 2015-2019 pemerintah telah merealisasikan program tersebut melalui pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Beberapa sasaran yang ingin dicapai adalah:

- Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah sebagaimana tersebut dalam Renstra Kemendikbud 2015-2019;
- Meningkatnya angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan;
- Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antar wilayah perkotaan dan perdesaan; serta antar daerah.

Dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai program di atas, pemerintah melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menetapkan target yang harus dicapai setiap tahunnya selama 2015-2019. Dengan demikian, tujuan pembangunan pendidikan dalam menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua dapat tercapai.

Menurut Lutz, Goujon, & Wils (2008) penting untuk membedakan antara arah (*flow*) dan persediaan (*stock*) dalam mengukur pencapaian pembangunan di bidang pendidikan. Uraian pada bab sebelumnya sudah menggambarkan arah (*flow*) pembangunan pendidikan di Papua, sementara pada bab ini akan diuraikan gambaran capaian persediaan (*stock*) sebagai hasil proses pembangunan pendidikan di Papua. Beberapa indikator yang menjadi tolak ukur pencapaian pembangunan yang dapat dihasilkan dari data Susenas di antaranya adalah Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka melanjutkan, dan angka putus sekolah.

### **Angka Melek Huruf (AMH)**

UNESCO mendefinisikan melek huruf sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan, dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Kemampuan ini merupakan modal dasar bagi seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, menggali potensi diri, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembangunan.

Indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan dasar tersebut adalah Angka Melek Huruf (AMH). AMH didefinisikan sebagai persentase penduduk 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca sekaligus menulis minimal dalam satu kalimat sederhana yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui indikator ini dapat dikaji seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, menambah pengetahuan dan keterampilan, memudahkan komunikasi, serta mempromosikan pemahaman yang lebih baik,

sehingga penduduk mampu meningkatkan kualitas diri, keluarga, maupun negara di berbagai sendi kehidupan. Di beberapa wilayah, AMH tidak lagi menjadi indikator yang mampu menunjukkan kualitas pembangunan manusia karena capaian AMH yang sudah tinggi, namun di Provinsi Papua indikator ini dirasa masih cukup mampu menjadi salah satu indikator kualitas pembangunan manusia di bidang pendidikan. Di sisi lain, indikator ini masih menjadi salah satu indikator pencapaian target SDGs yang menjamin bahwa pada tahun 2030 semua remaja dan proporsi kelompok penduduk dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kemampuan literasi dan numerasi.

**Tabel 5.1**

**Angka Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2018**

Karakteristik Demografi	Angka Melek Huruf		
	15+ tahun	15-24 tahun	15-59 tahun
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Total</b>	76,79	88,44	73,05
<b>Daerah Tempat Tinggal</b>			
<b>Perkotaan</b>	98,33	99,75	97,83
<b>Perdesaan</b>	68,05	83,40	63,30
<b>Jenis Kelamin</b>			
<b>Laki-laki</b>	81,69	91,59	78,44
<b>Perempuan</b>	71,26	84,76	67,04

Sumber: Susenas 2018

AMH sebagai indikator nasional SDGs diukur melalui AMH tiga kelompok umur penduduk yaitu AMH penduduk umur 15 tahun ke atas; AMH penduduk umur 15-24 tahun; dan AMH penduduk 15-59 tahun. Berdasarkan Tabel 5.1 secara umum capaian AMH 15 tahun ke atas di Provinsi Papua sebesar 76,79 persen. Apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai pemerintah secara nasional yaitu sebesar 96,10 persen maka dapat dikatakan capaian AMH 15 tahun ke atas di Papua belum mencapai target.

Pada Tabel 5.1 terlihat bahwa pencapaian tertinggi kemampuan membaca dan menulis ada pada kelompok umur 15-24 tahun yaitu sebesar 88,41 persen. Kelompok umur tersebut adalah

kelompok umur sekolah yaitu mereka yang seharusnya sudah mencapai partisipasi sekolah tertinggi dibandingkan kelompok umur lainnya, namun masih ada sekitar 12 persen penduduk dalam rentang usia tersebut yang tidak memiliki kemampuan baca dan tulis, sehingga perlu upaya keras agar permasalahan buta huruf di Papua dapat teratasi. Sementara itu pencapaian rendah ini dapat disebabkan oleh adanya penduduk tua dalam kelompok umur tersebut, yang pada masanya sistem pendidikan dasar belum berjalan efektif dan program keaksaraan belum digabungkan.

Secara umum, capaian AMH penduduk perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk di daerah perdesaan pada semua kelompok umur. Hal ini diduga disebabkan oleh partisipasi sekolah penduduk perdesaan yang lebih rendah dari penduduk di perkotaan. Begitu pula menurut jenis kelamin capaian AMH laki-laki lebih tinggi daripada perempuan pada semua kelompok umur, apabila dibandingkan partisipasi sekolah penduduk antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi sekolah laki-laki sedikit lebih tinggi daripada perempuan, sehingga hal tersebut mendorong capaian AMH laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan.

### **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menunjukkan hasil pencapaian pendidikan adalah rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas, karena mampu menunjukkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan. Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) merupakan indikator yang menunjukkan rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan misalnya tamat SD 6 tahun tamat SMP 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan (BPS, 2014).

**Tabel 5.2****Rata-rata Lama Sekolah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur dan Karakteristik Demografi, 2018**

Daerah Tempat Tinggal	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	10,44	10,31	10,38
Perdesaan	5,85	4,24	5,09
<b>Total</b>	<b>7,22</b>	<b>5,93</b>	<b>6,61</b>

Sumber: Susenas 2018

Rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun ke atas di Papua sebesar 6,61 tahun sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,56 tahun. Ini berarti bahwa rata-rata penduduk Papua bersekolah hanya sampai kelas 7 SMP/ sederajat. Angka tersebut dihitung tanpa mempertimbangkan kejadian tinggal kelas, atau dengan asumsi bahwa tidak ada kejadian tinggal kelas. Capaian lama sekolah di Papua ini masih jauh di bawah target yang ingin dicapai dalam RPJMN pemerintah yang menargetkan rata-rata lama sekolah penduduk mencapai 8,8 tahun pada tahun 2019.

Ketimpangan pendidikan antara perkotaan dan perdesaan tergambar dari Tabel 5.2. Hasil Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk di perkotaan mencapai 10,38 tahun atau setara dengan kelas 11 SMA/ sederajat. Di perdesaan, rata-rata lama sekolah penduduk sebesar 5,09 atau dengan kata lain rata-rata penduduk perdesaan di Papua hanya bersekolah sampai kelas 5 SD/ sederajat. Sementara itu, kesenjangan pendidikan juga terlihat jelas antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut tercermin dari capaian rata-rata lama sekolah laki-laki yang lebih tinggi daripada perempuan. Pada tahun 2018, rata-rata lama sekolah laki-laki mencapai 7,22 tahun atau setara dengan kelas 7 SMP/ sederajat sedangkan lama sekolah perempuan hanya sebesar 5,93 tahun setara dengan kelas 6 SD/ sederajat. Banyak faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya rata-rata lama sekolah perempuan di Papua, di antaranya adalah tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga ketika sumber daya terbatas yang diutamakan untuk sekolah adalah anak laki-

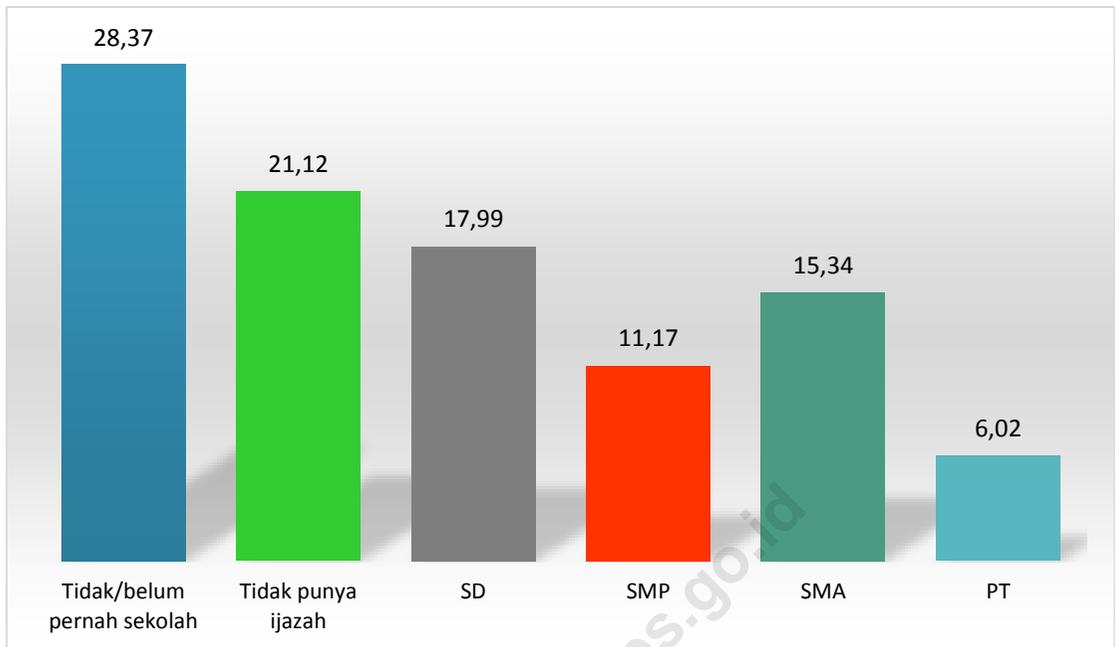
laki, stereotip dalam masyarakat yang masih memandang urusan perempuan adalah urusan domestik, atau belum pahamnya masyarakat akan manfaat pendidikan.

Capaian pembangunan pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah di atas menunjukkan bahwa untuk memenuhi target yang ditetapkan secara nasional, masih diperlukan kerja keras dan kebijakan-kebijakan pendidikan yang tepat sasaran. Capaian RLS sebesar 6,61 tahun masih cukup rendah, mengingat program Wajib Belajar 9 Tahun telah dilaksanakan sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan saat ini pemerintah telah mencanangkan program Wajib Belajar 12 tahun, sementara Papua belum mencapai pendidikan dasar 9 tahun.

### **Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang ditunjukkan oleh ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan karena masih relevan dengan tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam kegiatan ekonomi. Setiap lapangan perusahaan pasti berasumsi menerima pekerja dengan pendidikan tinggi lebih menguntungkan karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi produktivitasnya, meskipun produktivitas tidak semata-mata dipengaruhi oleh tingkat pendidikan tetapi juga faktor lainnya seperti pengalaman, pelatihan, lingkungan, dan sebagainya.

Tingkat pendidikan penduduk 15 tahun ke atas di Papua masih rendah. Dari Gambar 5.1 dapat dikatakan bahwa secara umum tingkat pendidikan penduduk Papua hanya mencapai pendidikan dasar. Data Susenas menunjukkan bahwa hanya 6,02 persen penduduk yang telah menamatkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Bahkan, persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah masih cukup besar yaitu mencapai 28,37 persen.



**Gambar 5.1 Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Penduduk 15 Tahun ke Atas, 2018**

Sumber: Susenas 2018

Kesenjangan pendidikan antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan perdesaan terlihat pada Tabel 5.3. Secara umum tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk 15 tahun ke atas di perkotaan adalah SMA/ sederajat, sementara di perdesaan hamper 40 persen penduduk bahkan tidak/belum pernah sekolah. Tingkat pendidikan yang pada umumnya ditamatkan oleh penduduk di daerah perdesaan adalah SD/ sederajat. Tabel tersebut juga menunjukkan ada sebesar 21,64 persen penduduk yang pernah bersekolah di jenjang pendidikan SD/ sederajat namun tidak mampu menamatkan pendidikan dasarnya atau putus sekolah.

**Tabel 5.3****Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Daerah Tempat Tinggal, 2018**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Daerah Tempat Tinggal		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	4,80	37,39	28,37
Tidak tamat SD	19,77	21,64	21,12
SD/ sederajat	16,40	18,60	17,99
SMP/ sederajat	15,26	9,60	11,17
SMA/ sederajat	31,32	9,22	15,34
Perguruan Tinggi	12,46	3,55	6,02
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas 2018

Menurut jenis kelamin, Tabel 5.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh penduduk laki-laki lebih baik daripada perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya persentase penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah (32,32 persen) dibandingkan penduduk laki-laki (24,83 persen). Secara umum tingkat pendidikan baik penduduk laki-laki maupun perempuan adalah pendidikan dasar. Meskipun demikian, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa persentase penduduk laki-laki yang menamatkan pendidikan menengah (18,01 persen) juga cukup tinggi dibandingkan perempuan (12,36 persen). Adanya kesenjangan tersebut dapat disebabkan karena perbedaan akses maupun kesempatan antara laki-laki dan perempuan dalam menikmati pendidikan di Papua.

**Tabel 5.4****Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin, 2018**

Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak/belum pernah sekolah	24,83	32,32	28,37
Tidak tamat SD	20,61	21,68	21,12
SD/ sederajat	18,17	17,79	17,99
SMP/ sederajat	11,89	10,36	11,17
SMA/ sederajat	18,01	12,36	15,34
Perguruan Tinggi	6,49	5,49	6,02
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

*Sumber:* Susenas 2018

Uraian di atas secara umum memberikan gambaran bahwa pembangunan pendidikan di Papua belum dapat dinikmati secara merata oleh semua penduduk di wilayah Papua. Penduduk di daerah perkotaan mendapatkan akses yang lebih besar terhadap pembangunan di bidang pendidikan dibandingkan penduduk di daerah perdesaan, penduduk laki-laki mendapatkan kesempatan yang lebih luas daripada perempuan, penduduk di wilayah pesisir cenderung mendapatkan akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan daripada di wilayah pegunungan. Paradigma pembangunan pendidikan adalah pendidikan harus diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, maupun geografis.

### Hasil Proses Pendidikan

Capaian proses pendidikan penduduk yang masih bersekolah dapat diukur melalui angka mengulang, angka naik kelas, angka bertahan, dan angka melanjutkan, sebagaimana yang ditampilkan pada Tabel 5.5.

**Tabel 5.5****Angka Mengulang, Angka Bertahan, Angka Melanjutkan, dan Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2018**

Indikator	Jenjang Pendidikan		
	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SM/ sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Angka Mengulang	9,46	10,79	7,68
Angka Bertahan	87,83		
Angka Melanjutkan		93,84	73,47

Sumber: Susenas 2018

Angka mengulang didefinisikan sebagai proporsi siswa yang terdaftar pada suatu tingkat kelas di tahun tertentu dan menduduki kelas yang sama di tahun berikutnya, atau bisa juga disebut proporsi siswa yang tinggal kelas. Tabel 5.5 menunjukkan bahwa proporsi siswa yang tinggal kelas pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat lebih tinggi dibandingkan pada jenjang SD/ sederajat dan SM/ sederajat. Pada tahun 2018, terdapat 10,79 persen siswa SMP/ sederajat yang tinggal kelas.

Indikator lain yang dapat menggambarkan capaian proses pendidikan adalah angka bertahan SD/ sederajat yang menunjukkan potensi anak yang baru masuk SD/ sederajat untuk dapat bertahan sampai dengan kelas lima. Indikator ini juga digunakan untuk memantau pelaksanaan pendidikan dasar yang universal. Angka yang mendekati 100 menunjukkan tingginya tingkat bertahan dan rendahnya kejadian putus sekolah di jenjang SD/ sederajat<sup>3</sup>. Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, angka bertahan siswa di Provinsi Papua sebesar 87,83 persen. Artinya, potensi anak di Papua untuk mencapai kelas 5 SD/ sederajat sudah lebih dari 85 persen. Pada tahun 2018, sedikitnya 87-88 dari 100 anak yang baru masuk SD/ sederajat dapat bertahan untuk tetap bersekolah sampai dengan kelas lima.

Selanjutnya, indikator angka melanjutkan menggambarkan persentase anak sekolah yang mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Indikator ini memberikan informasi

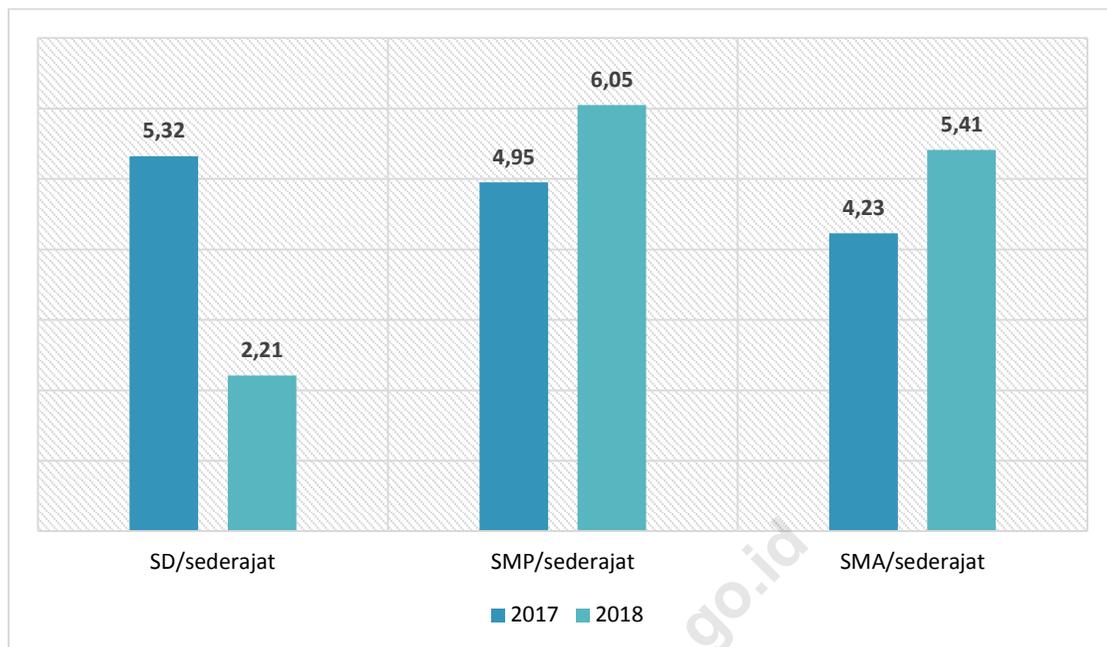
<sup>3</sup> UNESCO, 2009 dalam Publikasi Potret Pendidikan Indonesia 2018, BPS RI

terkait akses atau transisi dari satu jenjang pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Angka melanjutkan menjadi indikator output jika dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih rendah, sebaliknya menjadi indikator input apabila dilihat dari sisi jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Angka melanjutkan sekolah juga menggambarkan adanya seleksi oleh suatu sistem pendidikan karena faktor keilmuan maupun faktor ekonomi.

Angka melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat dan jenjang SMA/ sederajat masing-masing sebesar 93,84 persen dan 73,47 persen. Apabila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai oleh Kemendikbud dalam Renstra 2015-2019 yang menargetkan angka melanjutkan ke jenjang SMP/ sederajat sebesar 83,64 persen dan SMA sebesar 82 persen, maka dapat disimpulkan bahwa capaian angka melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/ sederajat di Papua sudah memenuhi target. Sementara untuk jenjang yang lebih tinggi yaitu SMA/ sederajat, hingga tahun 2018 masih cukup jauh dari target yang ingin dicapai.

### **Angka Putus Sekolah**

Pada Bab 4 sebelumnya terlihat bahwa semakin tinggi kelompok usia maka semakin rendah tingkat partisipasi sekolah. Misalnya, pada kelompok usia 13-15 tahun persentase penduduk yang masih bersekolah sebesar 80 persen. Angka ini terus menurun seiring dengan meningkatnya usia penduduk. Pada kelompok usia 16-18 tahun dan 19-24 tahun, persentase penduduk yang masih bersekolah menjadi masing-masing sebesar 63,48 persen dan 23,37 persen. Gambaran partisipasi sekolah di atas mengindikasikan adanya penduduk yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena putus sekolah.



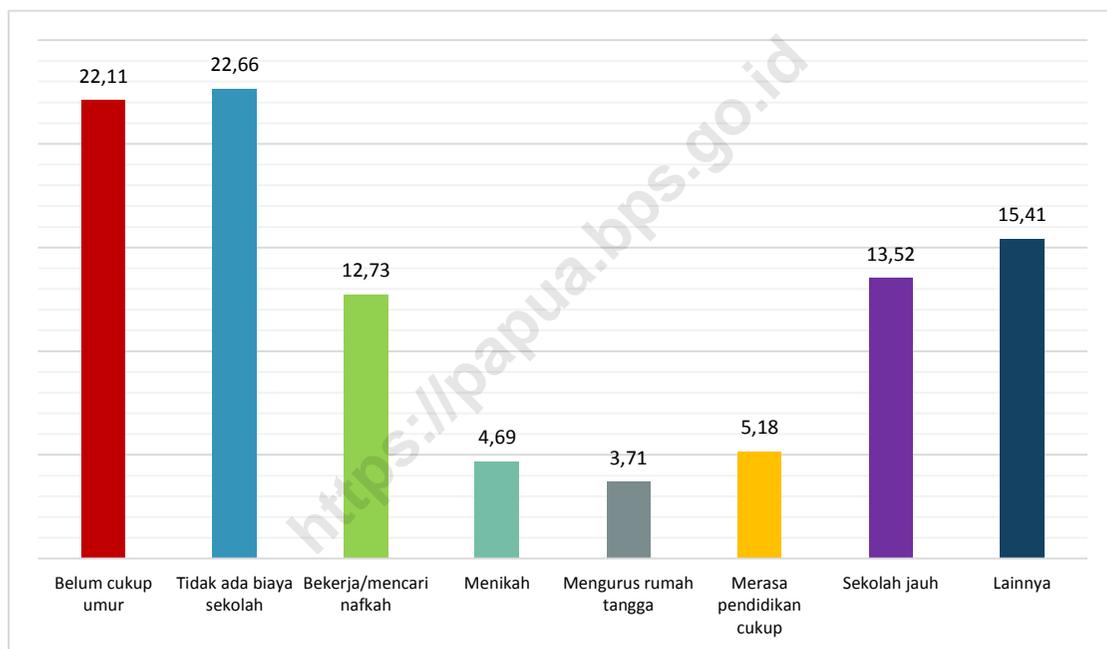
**Gambar 5.2 Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, 2018**

Sumber: Susenas 2018

Renstra Kemendikbud 2015-2019 menargetkan angka putus sekolah sebesar satu persen pada masing-masing jenjang pendidikan (SD/SMP/SMA). Dari Gambar 5.2 terlihat bahwa Provinsi Papua belum dapat memenuhi target tersebut. Angka putus sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan masih cukup tinggi. Data Susenas menunjukkan bahwa pada tahun 2018, angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/ sederajat sebesar 2,21 persen; jenjang pendidikan SMP sebesar 6,05 persen; dan jenjang pendidikan SMA/ sederajat sebesar 5,41 persen. Meskipun demikian, pemerintah pusat maupun daerah melalui kebijakan pembangunan berhasil menurunkan persentase siswa yang putus sekolah di jenjang SD/ sederajat. Sayangnya, usaha tersebut belum terlihat untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat. Sebaliknya, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

## Alasan Putus Sekolah

Secara ideal angka putus sekolah seharusnya mencapai nol persen, sehingga perlu diketahui faktor yang menyebabkan tingginya persentase siswa putus sekolah di Papua. Faktor yang dapat mempengaruhi putus sekolah dapat berasal dari internal (kemauan siswa) dan eksternal (sekolah). Data Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 2018 menunjukkan beberapa alasan penduduk usia 5-24 tahun yang belum pernah atau tidak bersekolah lagi sebagaimana yang ditunjukkan melalui Gambar 5.3.



**Gambar 5.3 Alasan Utama Penduduk 5-24 Tahun yang Belum Pernah atau Tidak Bersekolah Lagi, 2018**

Sumber: Susenas 2018

Dari gambar di atas terlihat bahwa alasan utama penduduk usia 5-24 tahun di Papua belum pernah atau tidak bersekolah lagi dikarenakan tidak ada biaya sekolah. Alasan lainnya adalah belum cukup umur sebesar 22,11 persen, alasan lainnya (seperti cacat/disabilitas, lainnya) sebesar 15,41 persen, sekolah jauh (13,52 persen), bekerja/mencari nafkah sebesar 12,73 persen. Selain itu,

disebabkan juga oleh alasan menikah, mengurus rumah tangga, dan merasa pendidikan cukup yang masing-masing persentasenya kurang dari enam persen.

**Tabel 5.6**

**Persentase Penduduk 5-24 Tahun yang Belum Pernah atau Tidak Bersekolah Lagi Menurut Alasan Utama dan Jenis Kelamin, 2018**

Jenis Kelamin	Kelompok Umur	Alasan belum pernah/tidak bersekolah lagi *)							
		1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Laki-laki	5 – 6 tahun	84,11	3,97	0,00	0,00	0,47	0,00	6,07	5,37
	7 – 12 tahun	0,97	54,87	2,27	0,00	0,00	0,00	21,10	20,78
	13 – 15 tahun	0,00	31,08	14,19	0,68	2,70	3,38	27,03	20,95
	16 – 18 tahun	0,00	22,48	22,94	5,05	4,59	7,34	19,72	17,89
	19 – 24 tahun	0,00	16,85	24,26	12,04	8,33	11,85	8,89	17,78
	<b>Total</b>		23,22	20,74	16,57	2,37	1,35	5,86	14,43
Perempuan	5 – 6 tahun	83,78	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41	5,95
	7 – 12 tahun	1,40	55,94	2,10	0,00	0,00	0,00	18,88	21,68
	13 – 15 tahun	0,00	38,10	11,11	1,59	3,17	1,59	25,40	19,05
	16 – 18 tahun	0,00	24,27	15,53	7,77	5,83	7,77	19,42	19,42
	19 – 24 tahun	0,00	19,16	13,79	18,01	15,71	9,20	8,05	16,09
	<b>Total</b>		20,79	24,90	8,21	7,42	6,49	4,37	12,45
<b>Total</b>		<b>22,11</b>	<b>22,66</b>	<b>12,73</b>	<b>4,69</b>	<b>3,71</b>	<b>5,18</b>	<b>13,52</b>	<b>15,41</b>

Sumber: Susenas MSBP 2018

**Keterangan \*):**

- 1 : Belum cukup umur
- 2 : Tidak ada biaya sekolah
- 3 : Bekerja/mencari nafkah
- 4 : Menikah
- 5 : Mengurus rumah tangga
- 6 : Merasa pendidikan cukup
- 7 : Sekolah jauh
- 8 : Lainnya

Apabila dilihat lagi menurut kelompok umur, terlihat bahwa selain alasan tidak ada biaya sekolah, fasilitas sekolah juga menjadi alasan yang cukup besar mempengaruhi keberlanjutan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Pada kelompok umur 5-6 tahun, sebesar 6,07 persen penduduk

merasa kesulitan untuk sekolah karena sekolah yang jauh. Persentase tersebut semakin meningkat pada kelompok usia penduduk 7-12 tahun dan 13-15 tahun atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa jumlah sekolah yang dekat dengan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat keberlanjutan siswa di Papua. Selanjutnya, pada kelompok umur yang lebih tinggi (16-18 tahun dan 19-24 tahun), alasan utama tidak bersekolah lagi dikarenakan harus bekerja/mencari nafkah.

Menurut jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki usia 5-6 tahun yang belum bersekolah karena belum cukup umur lebih tinggi (23,22 persen) daripada perempuan (20,79 persen). Ini mengindikasikan bahwa perempuan memulai sekolah lebih awal daripada laki-laki. Hal yang cukup menarik adalah pada setiap kelompok umur laki-laki, alasan utama penduduk 5-24 tahun tidak melanjutkan sekolah berbeda-beda. Misalkan pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun alasan utamanya adalah tidak punya biaya sekolah, dan pada kelompok umur lebih tinggi (16-18 tahun dan 19-24 tahun) alasan utamanya dikarenakan bekerja atau mencari nafkah. Namun, alasan utama penduduk perempuan usia 5-24 tahun tidak bersekolah lagi selalu sama pada setiap kelompok umur, yaitu dikarenakan tidak ada biaya sekolah. Gambaran ini dapat mengindikasikan bahwa pada rumah tangga yang memiliki keterbatasan ekonomi, laki-laki merupakan pilihan utama untuk sekolah.

### **Kebiasaan Belajar di Luar Jam Sekolah**

Indikator ini digunakan untuk mengukur penduduk lima tahun ke atas yang masih bersekolah yang memiliki kebiasaan belajar di luar jam sekolah. Kebiasaan ini merupakan pendukung tercapainya hasil pendidikan yang lebih baik. Kebiasaan belajar di luar jam sekolah ini diharapkan memberikan dampak bagi sekitar dan masyarakat, memberikan contoh baik, merubah sikap dan hingga akhirnya merubah kebiasaan sosial budaya masyarakat menjadi semakin peduli akan pendidikan.

Data Susenas 2018 menunjukkan bahwa di Papua, penduduk lima tahun ke atas yang masih sekolah ternyata tidak memiliki kebiasaan belajar lagi di luar jam sekolah (65,26 persen). Kondisi tersebut tidak berbeda antara laki-laki maupun perempuan.

**Tabel 5.7**

**Persentase Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah Menurut Jenis Kelamin, Kelompok Umur, dan Kebiasaan Belajar di Luar Jam Sekolah, 2018**

Jenis Kelamin	Belajar di Luar Jam Sekolah		Total
	Ya	Tidak	
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Jenis Kelamin</b>			
Laki-Laki	32,16	67,84	100,00
Perempuan	37,91	62,09	100,00
<b>Kelompok Umur</b>			
5 – 6	40,40	59,60	100,00
7 – 12	34,95	65,05	100,00
13 – 15	41,56	58,44	100,00
16 – 18	37,67	62,33	100,00
19 – 24	13,41	86,59	100,00
25+	47,83	52,17	100,00
<b>Total</b>	<b>34,74</b>	<b>65,26</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Susenas MSBP, 2018

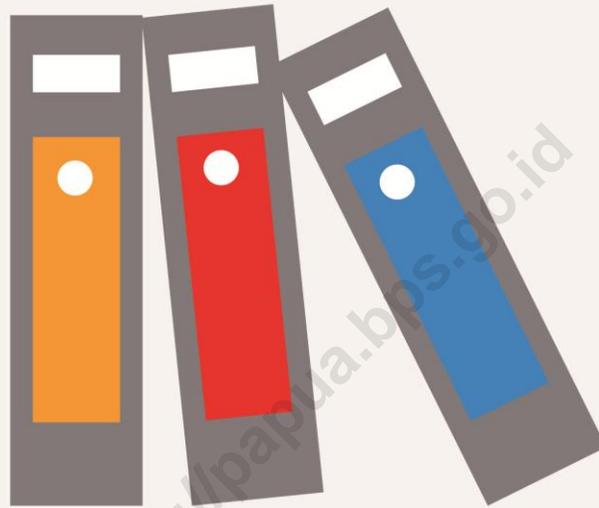
Selanjutnya, menurut kelompok umur terlihat bahwa semakin tinggi umur penduduk, maka semakin kecil persentase penduduk yang memiliki kebiasaan belajar di luar jam sekolah. Seperti yang terlihat pada Tabel 5.7, persentase penduduk pada kelompok umur 19-24 tahun yang memiliki kebiasaan belajar di luar jam sekolah sangat kecil yaitu sebesar 13,41 persen. Ini mengindikasikan bahwa penduduk yang sedang dalam menjalani pendidikan di perguruan tinggi (mahasiswa) ini justru tidak memiliki kebiasaan belajar di luar jam sekolah. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena tujuan mahasiswa adalah sebagai *moral force* atau kekuatan moral dan sebagai *agent of change* atau agen perubahan.

Tentu ini menjadi tugas besar bagi para pendidik yang ada di Papua dan menjadi bahan evaluasi dasar bagaimana salah satu hasil proses belajar mengajar atau proses pendidikan yang ada di Papua. Karena kebiasaan belajar di luar jam sekolah ini tentunya menjadi salah satu indikator

bagaimana proses belajar mengajar terjadi selama di sekolah, mampu merubah sifat dan sikap seorang siswa menjadi lebih siap untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi, mampu merubah kebiasaan siswa yang memperdalam kembali apa yang telah diperoleh selama disekolah, dan masih banyak hal yang diharapkan berubah pada tiap individu jika memiliki kebiasaan belajar di luar jam sekolah.

<https://papua.bps.go.id>





# DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik [BPS]. (2012). POTRET PENDIDIKAN INDONESIA: Statistik Pendidikan Indonesia 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

\_\_\_\_\_. (2013). Indikator Pendidikan Provinsi Papua Tahun 2017. Jayapura: BPS Provinsi Papua.

Manar, A.R. (2012). Multiple Indicator Cluster Surveys Workshop Analisis Data dan Penulisan Laporan, "Bagaimana membuat Laporan MICS yang bagus?". Disampaikan dalam Workshop Analisis Data dan Penulisan MICS. Manokwari.

Mankiw, Gregory, N. (2006). Makro Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

Pasay, N.H., Handayani, D., & Indrayanti, R. (2015). "... " dalam Mozaik Demografi: Untaian Pemikiran Kependudukan dan Pembangunan. Jakarta: Salemba Empat.

Rapi, Mujahidah. (tanpa tahun). "Konsep Pendidikan Anak Usia Dini".

Sulistyowati, N., & Rohayati, E. (2006). Administrasi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar, Bahan Ajar Diklat Manajemen Sekolah Dasar. Malang: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

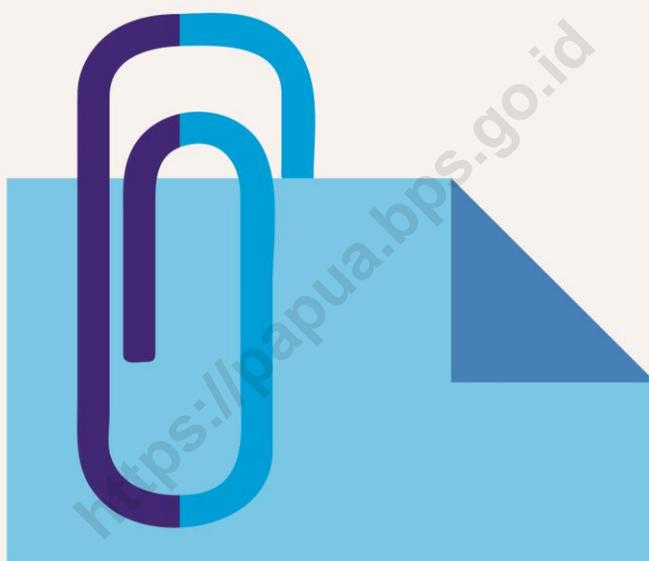
Todaro, M.P., & Smith, S.C. (2006). Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.

UNESCO. (2000). The Dakar Framework for Action, Education for All: Meeting Our Collective Commitments. Dakar: World Education Forum.

UNESCO. (2015). Education For All 2000-2015: Achievements and Challenges. France: UNESCO.

<http://kemendikbud.go.id>





# LAMPIRAN

**Tabel 1. Persentase Penduduk 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Prasekolah, 2018**

Kabupaten/Kota	Partisipasi Prasekolah			Total	Sampel Penduduk 0-6 Tahun
	Masih/pernah mengikuti prasekolah TA 2017/2018	Pernah mengikuti prasekolah TA 2017/2018 dan sebelum TA 2017/2018	Tidak/belum pernah mengikuti prasekolah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	16,33	4,78	78,89	100,00	286
Jayawijaya	5,61	3,95	90,44	100,00	179
Jayapura	17,33	5,74	76,93	100,00	281
Nabire	9,57	6,93	83,50	100,00	220
Kep, Yapen	6,65	4,77	88,57	100,00	284
Biak Numfor	8,97	6,29	84,75	100,00	302
Paniai	3,07	0,75	96,18	100,00	421
Puncak Jaya	1,56	1,14	97,30	100,00	282
Mimika	10,12	6,18	83,69	100,00	279
Boven Digoel	10,05	5,84	84,11	100,00	315
Mappi	5,83	1,95	92,23	100,00	516
Asmat	5,53	1,50	92,97	100,00	420
Yahukimo	0,68	1,18	98,14	100,00	211
Peg, Bintang	4,38	2,16	93,47	100,00	306
Tolikara	2,14	2,92	94,93	100,00	220
Sarmi	19,07	7,30	73,63	100,00	175
Keerom	10,31	5,91	83,78	100,00	186
Waropen	27,33	4,54	68,14	100,00	126
Supiori	23,30	1,70	75,00	100,00	134
Mamberamo Raya	18,95	3,44	77,61	100,00	151
Nduga	10,71	0,00	89,29	100,00	292
Lanny Jaya	2,49	0,00	97,51	100,00	138
Mamberamo Tengah	0,85	0,00	99,15	100,00	153
Yalimo	0,61	4,25	95,14	100,00	223
Puncak	0,53	0,00	99,47	100,00	188
Dogiyai	4,12	0,00	95,88	100,00	98
Intan Jaya	1,07	0,67	98,26	100,00	260
Deiyai	0,43	0,09	99,48	100,00	233
Kota Jayapura	13,19	5,08	81,73	100,00	243
<b>Papua</b>	<b>7,63</b>	<b>3,28</b>	<b>89,09</b>	<b>100,00</b>	<b>7 122</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 2a. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan 5 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018**

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah			Total	Jumlah Sampel
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	6,48	28,51	65,01	100,00	1 514
Jayawijaya	29,35	27,58	43,07	100,00	1 394
Jayapura	7,16	28,77	64,07	100,00	1 621
Nabire	10,31	27,79	61,90	100,00	1 479
Kep, Yapen	8,95	28,32	62,73	100,00	1 677
Biak Numfor	3,50	31,11	65,40	100,00	1 843
Paniai	37,25	23,15	39,60	100,00	1 554
Puncak Jaya	54,30	20,00	25,69	100,00	1 449
Mimika	4,55	26,26	69,18	100,00	1 656
Boven Digoel	11,61	22,65	65,74	100,00	1 224
Mappi	13,01	28,03	58,96	100,00	1 891
Asmat	23,99	24,03	51,98	100,00	1 334
Yahukimo	44,45	21,12	34,42	100,00	1 757
Peg, Bintang	46,62	21,85	31,54	100,00	1 393
Tolikara	46,59	19,39	34,02	100,00	1 130
Sarmi	6,57	25,33	68,10	100,00	915
Keerom	9,99	25,28	64,74	100,00	1 152
Waropen	6,55	29,03	64,41	100,00	704
Supiori	5,23	31,97	62,80	100,00	720
Mamberamo Raya	19,02	31,70	49,27	100,00	717
Nduga	60,91	18,92	20,17	100,00	1 464
Lanny Jaya	53,18	24,67	22,15	100,00	1 209
Mamberamo Tengah	55,45	24,41	20,13	100,00	819
Yalimo	46,98	23,78	29,24	100,00	1 252
Puncak	72,54	12,73	14,73	100,00	1 428
Dogiyai	50,03	27,85	22,11	100,00	723
Intan Jaya	70,30	14,66	15,04	100,00	902
Deiyai	69,07	18,71	12,22	100,00	1 111
Kota Jayapura	3,83	28,41	67,76	100,00	1 828
<b>Papua</b>	<b>28,37</b>	<b>24,91</b>	<b>46,72</b>	<b>100,00</b>	<b>37 860</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 2b. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018**

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah			Total	Jumlah Sampel
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	5,77	29,21	65,02	100,00	785
Jayawijaya	24,37	28,13	47,50	100,00	709
Jayapura	6,10	29,11	64,79	100,00	826
Nabire	9,68	26,54	63,78	100,00	766
Kep, Yapen	7,20	27,42	65,38	100,00	879
Biak Numfor	2,75	31,26	65,99	100,00	908
Paniai	31,90	25,54	42,56	100,00	825
Puncak Jaya	49,09	21,57	29,34	100,00	824
Mimika	3,04	23,24	73,72	100,00	858
Boven Digoel	9,45	21,88	68,67	100,00	647
Mappi	10,64	26,87	62,50	100,00	956
Asmat	19,35	25,19	55,46	100,00	703
Yahukimo	39,06	21,29	39,65	100,00	927
Peg, Bintang	40,89	21,99	37,12	100,00	745
Tolikara	41,69	20,44	37,87	100,00	594
Sarmi	5,75	25,52	68,73	100,00	481
Keerom	7,44	23,35	69,21	100,00	576
Waropen	5,42	30,79	63,79	100,00	364
Supiori	5,59	33,84	60,57	100,00	369
Mamberamo Raya	12,67	31,70	55,63	100,00	365
Nduga	55,96	20,71	23,33	100,00	796
Lanny Jaya	44,32	27,79	27,88	100,00	629
Mamberamo Tengah	44,02	27,10	28,88	100,00	431
Yalimo	40,55	27,43	32,02	100,00	640
Puncak	68,25	12,76	18,99	100,00	743
Dogiyai	45,78	28,16	26,05	100,00	369
Intan Jaya	64,99	15,86	19,15	100,00	449
Deiyai	63,49	19,87	16,64	100,00	601
Kota Jayapura	3,77	27,95	68,28	100,00	952
<b>Papua</b>	<b>24,83</b>	<b>25,28</b>	<b>49,89</b>	<b>100,00</b>	<b>19 717</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 2c. Persentase Penduduk Perempuan Usia 5 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018**

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah			Total	Jumlah Sampel
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	7,25	27,74	65,01	100,00	729
Jayawijaya	34,62	27,00	38,38	100,00	685
Jayapura	8,34	28,39	63,28	100,00	795
Nabire	11,02	29,20	59,78	100,00	713
Kep, Yapen	10,80	29,29	59,91	100,00	798
Biak Numfor	4,27	30,95	64,78	100,00	935
Paniai	43,09	20,54	36,37	100,00	729
Puncak Jaya	61,16	17,94	20,90	100,00	625
Mimika	6,48	30,09	63,43	100,00	798
Boven Digoel	14,21	23,59	62,20	100,00	577
Mappi	15,38	29,20	55,42	100,00	935
Asmat	28,81	22,82	48,37	100,00	631
Yahukimo	49,95	20,95	29,10	100,00	830
Peg, Bintang	52,87	21,68	25,44	100,00	648
Tolikara	52,32	18,17	29,51	100,00	536
Sarmi	7,55	25,10	67,35	100,00	434
Keerom	12,95	27,52	59,53	100,00	576
Waropen	7,83	27,05	65,12	100,00	340
Supiori	4,83	29,87	65,30	100,00	351
Mamberamo Raya	25,89	31,71	42,40	100,00	352
Nduga	67,10	16,68	16,22	100,00	668
Lanny Jaya	63,13	21,16	15,71	100,00	580
Mamberamo Tengah	69,05	21,22	9,73	100,00	388
Yalimo	54,45	19,54	26,01	100,00	612
Puncak	77,15	12,70	10,15	100,00	685
Dogiyai	54,33	27,54	18,13	100,00	354
Intan Jaya	75,60	13,45	10,94	100,00	453
Deiyai	75,12	17,45	7,43	100,00	510
Kota Jayapura	3,90	28,96	67,14	100,00	876
<b>Papua</b>	<b>32,32</b>	<b>24,50</b>	<b>43,17</b>	<b>100,00</b>	<b>18 413</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 3a. Persentase Penduduk Laki-laki Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018**

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah			Total	Jumlah Sampel
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	0,90	73,87	25,23	100,00	293
Jayawijaya	10,53	77,42	12,04	100,00	272
Jayapura	2,22	71,46	26,33	100,00	380
Nabire	4,54	68,85	26,61	100,00	305
Kep, Yapen	3,25	66,04	30,71	100,00	402
Biak Numfor	1,11	73,85	25,04	100,00	399
Paniai	18,03	69,92	12,05	100,00	362
Puncak Jaya	23,41	43,60	32,99	100,00	388
Mimika	1,07	57,62	41,31	100,00	345
Boven Digoel	5,73	60,60	33,67	100,00	250
Mappi	6,00	60,16	33,84	100,00	439
Asmat	14,10	62,48	23,42	100,00	312
Yahukimo	32,84	48,74	18,42	100,00	418
Peg, Bintang	32,78	55,09	12,13	100,00	318
Tolikara	26,03	54,04	19,93	100,00	214
Sarmi	2,85	66,14	31,01	100,00	205
Keerom	4,40	61,06	34,54	100,00	231
Waropen	3,48	73,41	23,11	100,00	151
Supiori	3,63	76,42	19,95	100,00	155
Mamberamo Raya	3,73	65,67	30,60	100,00	178
Nduga	36,08	48,32	15,60	100,00	343
Lanny Jaya	19,39	67,56	13,05	100,00	245
Mamberamo Tengah	20,86	69,59	9,55	100,00	171
Yalimo	13,45	66,91	19,65	100,00	296
Puncak	56,49	28,25	15,26	100,00	339
Dogiyai	16,31	68,86	14,83	100,00	129
Intan Jaya	37,53	53,20	9,27	100,00	163
Deiyai	46,33	50,36	3,31	100,00	230
Kota Jayapura	1,18	69,19	29,63	100,00	372
<b>Papua</b>	<b>14,91</b>	<b>62,30</b>	<b>22,79</b>	<b>100,00</b>	<b>8 305</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 3b. Persentase Penduduk Perempuan Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018**

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah				Jumlah Sampel
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	2,21	74,59	23,19	100,00	281
Jayawijaya	12,94	73,54	13,52	100,00	237
Jayapura	2,07	73,16	24,77	100,00	331
Nabire	8,99	69,39	21,62	100,00	274
Kep, Yapen	4,45	74,15	21,40	100,00	343
Biak Numfor	2,00	76,49	21,51	100,00	402
Paniai	27,76	54,59	17,65	100,00	271
Puncak Jaya	25,75	55,10	19,15	100,00	225
Mimika	3,90	73,80	22,30	100,00	311
Boven Digoel	5,23	65,09	29,67	100,00	226
Mappi	7,95	63,04	29,01	100,00	439
Asmat	15,86	56,12	28,03	100,00	256
Yahukimo	33,56	46,91	19,53	100,00	355
Peg, Bintang	34,89	50,70	14,40	100,00	280
Tolikara	28,14	51,50	20,35	100,00	170
Sarmi	2,00	70,21	27,78	100,00	175
Keerom	5,89	70,64	23,46	100,00	243
Waropen	4,64	70,85	24,51	100,00	137
Supiori	2,70	72,50	24,80	100,00	153
Mamberamo Raya	2,90	69,09	28,01	100,00	163
Nduga	45,60	44,11	10,29	100,00	247
Lanny Jaya	27,49	54,46	18,05	100,00	190
Mamberamo Tengah	36,00	60,42	3,58	100,00	139
Yalimo	28,26	47,97	23,77	100,00	272
Puncak	62,51	27,81	9,69	100,00	295
Dogiyai	15,26	68,53	16,21	100,00	136
Intan Jaya	63,05	31,40	5,55	100,00	190
Deiyai	40,62	54,53	4,85	100,00	171
Kota Jayapura	1,07	74,47	24,45	100,00	348
<b>Papua</b>	<b>18,08</b>	<b>62,13</b>	<b>19,78</b>	<b>100,00</b>	<b>7 260</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 3c. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan Usia 7-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Partisipasi Sekolah, 2018**

Kabupaten/Kota	Partisipasi Sekolah			Total	Jumlah Sampel
	Tidak/belum pernah sekolah	Masih bersekolah	Tidak bersekolah lagi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Merauke	1,53	74,22	24,26	100,00	574
Jayawijaya	11,70	75,55	12,75	100,00	509
Jayapura	2,15	72,25	25,60	100,00	711
Nabire	6,69	69,11	24,19	100,00	579
Kep, Yapen	3,83	69,95	26,23	100,00	745
Biak Numfor	1,53	75,11	23,36	100,00	801
Paniai	22,59	62,73	14,68	100,00	633
Puncak Jaya	24,30	47,97	27,73	100,00	613
Mimika	2,33	64,83	32,84	100,00	656
Boven Digoel	5,51	62,64	31,86	100,00	476
Mappi	6,98	61,61	31,40	100,00	878
Asmat	14,98	59,31	25,71	100,00	568
Yahukimo	33,20	47,82	18,98	100,00	773
Peg, Bintang	33,88	52,80	13,32	100,00	598
Tolikara	26,98	52,90	20,12	100,00	384
Sarmi	2,47	67,97	29,55	100,00	380
Keerom	5,11	65,64	29,25	100,00	474
Waropen	4,00	72,27	23,73	100,00	288
Supiori	3,21	74,65	22,14	100,00	308
Mamberamo Raya	3,34	67,27	29,39	100,00	341
Nduga	40,03	46,57	13,40	100,00	590
Lanny Jaya	23,05	61,64	15,31	100,00	435
Mamberamo Tengah	27,38	65,64	6,98	100,00	310
Yalimo	20,41	58,00	21,59	100,00	568
Puncak	59,38	28,04	12,58	100,00	634
Dogiyai	15,78	68,69	15,53	100,00	265
Intan Jaya	52,39	40,51	7,10	100,00	353
Deiyai	43,84	52,18	3,98	100,00	401
Kota Jayapura	1,13	71,70	27,17	100,00	720
<b>Papua</b>	<b>16,40</b>	<b>62,22</b>	<b>21,38</b>	<b>100,00</b>	<b>15 565</b>

Sumber: Susenas 2018

Tabel 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kabupaten/Kota	APK		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	110,78	122,75	99,20
Jayawijaya	98,92	106,97	92,51
Jayapura	110,28	97,02	85,11
Nabire	108,60	97,99	99,35
Kep, Yapen	109,73	92,63	79,67
Biak Numfor	117,85	99,84	92,23
Paniai	91,07	135,50	38,57
Puncak Jaya	100,65	85,93	36,87
Mimika	101,35	125,76	129,86
Boven Digoel	103,99	107,91	49,07
Mappi	115,23	79,27	42,49
Asmat	103,41	57,71	39,32
Yahukimo	86,41	42,71	20,85
Peg, Bintang	87,49	59,17	42,21
Tolikara	69,75	79,58	39,25
Sarmi	105,13	91,66	82,24
Keerom	97,97	87,99	77,93
Waropen	99,85	88,79	117,76
Supiori	103,73	80,63	109,43
Mamberamo Raya	129,54	62,01	56,15
Nduga	65,53	48,24	14,76
Lanny Jaya	73,13	90,69	48,91
Mamberamo Tengah	92,64	76,01	60,98
Yalimo	86,27	89,61	38,24
Puncak	59,58	36,67	9,40
Dogiyai	97,88	84,18	60,77
Intan Jaya	69,49	74,33	22,61
Deiyai	68,41	58,44	55,12
Kota Jayapura	109,32	104,00	93,57
<b>Papua</b>	<b>94,47</b>	<b>87,81</b>	<b>65,07</b>

Sumber: Susenas 2018

Tabel 5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur, 2018

Kabupaten/Kota	APS		
	7-12	13-15	16-18
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	96,33	97,64	76,57
Jayawijaya	91,18	89,63	77,11
Jayapura	95,04	92,74	81,56
Nabire	92,43	93,08	80,24
Kep, Yapen	93,68	95,72	78,75
Biak Numfor	95,46	97,90	86,15
Paniai	84,41	79,94	46,58
Puncak Jaya	78,42	65,75	42,86
Mimika	95,97	94,86	78,54
Boven Digoel	89,42	91,14	62,42
Mappi	87,19	81,36	54,00
Asmat	82,66	78,91	56,20
Yahukimo	61,85	66,03	34,14
Peg, Bintang	72,04	69,04	35,42
Tolikara	67,35	60,77	45,13
Sarmi	92,26	90,40	69,72
Keerom	90,22	88,69	77,43
Waropen	91,52	94,06	79,12
Supiori	94,85	90,44	77,10
Mamberamo Raya	97,46	95,84	68,20
Nduga	56,72	53,32	36,92
Lanny Jaya	76,49	73,26	58,38
Mamberamo Tengah	85,84	80,02	54,41
Yalimo	89,06	61,21	60,78
Puncak	51,92	29,03	28,73
Dogiyai	86,30	84,46	65,92
Intan Jaya	61,42	51,93	46,00
Deiyai	63,67	57,49	53,82
Kota Jayapura	95,10	97,94	91,22
<b>Papua</b>	<b>82,38</b>	<b>79,90</b>	<b>63,46</b>

Sumber: Susenas 2018

Tabel 6. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kabupaten/Kota dan Jenjang Pendidikan, 2018

Kabupaten/Kota	APM		
	SD	SMP	SMA
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	92,66	70,07	64,78
Jayawijaya	89,83	74,31	66,87
Jayapura	93,90	71,34	67,31
Nabire	88,50	67,68	61,49
Kep, Yapen	90,98	65,06	54,94
Biak Numfor	90,97	70,71	62,26
Paniai	72,29	52,58	25,44
Puncak Jaya	75,44	24,97	21,22
Mimika	91,59	75,11	67,05
Boven Digoel	85,67	66,44	34,63
Mappi	83,25	35,20	16,42
Asmat	82,65	35,87	20,59
Yahukimo	61,52	26,36	12,33
Peg, Bintang	64,70	29,09	21,36
Tolikara	60,03	52,24	33,78
Sarmi	91,39	74,99	52,22
Keerom	85,20	71,42	60,95
Waropen	89,81	71,65	61,01
Supiori	94,85	62,30	56,52
Mamberamo Raya	96,82	56,20	51,44
Nduga	56,72	34,68	9,35
Lanny Jaya	69,58	68,00	46,05
Mamberamo Tengah	85,84	71,36	54,41
Yalimo	80,07	52,08	28,26
Puncak	51,02	23,09	9,13
Dogiyai	85,74	68,65	39,22
Intan Jaya	60,44	14,58	8,61
Deiyai	61,94	45,53	51,28
Kota Jayapura	94,66	78,02	62,15
<b>Papua</b>	<b>79,09</b>	<b>57,09</b>	<b>44,31</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 7. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	96,23	94,47	95,40
Jayawijaya	88,77	74,46	81,95
Jayapura	97,76	95,73	96,81
Nabire	93,80	90,38	92,22
Kep, Yapen	96,45	89,68	93,16
Biak Numfor	98,65	98,08	98,37
Paniai	71,68	58,50	65,36
Puncak Jaya	79,22	68,82	74,56
Mimika	99,67	97,22	98,64
Boven Digoel	91,76	86,08	89,25
Mappi	94,57	88,59	91,60
Asmat	80,89	69,68	75,35
Yahukimo	72,93	55,40	64,15
Peg, Bintang	73,14	52,01	62,98
Tolikara	69,01	54,44	62,39
Sarmi	97,09	92,21	94,91
Keerom	95,65	90,10	93,14
Waropen	98,91	95,61	97,34
Supiori	96,51	96,96	96,73
Mamberamo Raya	86,58	69,13	78,10
Nduga	44,36	32,01	38,78
Lanny Jaya	51,72	26,89	39,67
Mamberamo Tengah	57,32	22,65	40,58
Yalimo	54,84	39,24	47,63
Puncak	57,55	44,11	51,05
Dogiyai	49,73	34,81	42,24
Intan Jaya	40,04	24,56	32,22
Deiyai	39,75	23,09	31,54
Kota Jayapura	98,87	98,08	98,52
<b>Papua</b>	<b>81,69</b>	<b>71,26</b>	<b>76,79</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 8. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15-24 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	99,79	100,00	99,88
Jayawijaya	92,81	91,04	92,01
Jayapura	98,74	99,29	98,99
Nabire	97,32	89,41	93,66
Kep, Yapen	99,11	96,06	97,70
Biak Numfor	100,00	99,69	99,85
Paniai	80,08	66,20	72,93
Puncak Jaya	89,80	89,25	89,59
Mimika	100,00	95,64	98,30
Boven Digoel	95,21	97,44	96,10
Mappi	96,83	95,13	95,96
Asmat	91,47	84,01	87,33
Yahukimo	80,84	77,74	79,19
Peg, Bintang	79,72	72,84	75,91
Tolikara	89,26	79,40	85,28
Sarmi	100,00	100,00	100,00
Keerom	97,77	96,42	97,17
Waropen	100,00	100,00	100,00
Supiori	99,09	100,00	99,52
Mamberamo Raya	98,38	95,74	97,10
Nduga	81,26	70,06	77,02
Lanny Jaya	82,27	65,56	74,40
Mamberamo Tengah	67,90	53,00	60,70
Yalimo	84,61	65,34	75,40
Puncak	73,65	55,61	64,90
Dogiyai	89,69	78,10	83,84
Intan Jaya	71,10	24,00	39,88
Deiyai	49,60	59,71	54,09
Kota Jayapura	100,00	100,00	100,00
<b>Papua</b>	<b>91,59</b>	<b>84,76</b>	<b>88,44</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 9. Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 25 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	95,05	92,98	94,05
Jayawijaya	87,68	70,56	79,40
Jayapura	97,37	94,47	95,99
Nabire	92,56	90,72	91,71
Kep, Yapen	95,41	87,48	91,49
Biak Numfor	98,13	97,53	97,83
Paniai	69,90	56,56	63,60
Puncak Jaya	75,01	63,01	69,38
Mimika	99,54	97,72	98,76
Boven Digoel	90,70	83,29	87,34
Mappi	93,69	85,80	89,82
Asmat	78,30	64,89	71,90
Yahukimo	70,07	45,84	58,22
Peg, Bintang	71,53	44,56	59,14
Tolikara	63,53	49,20	56,85
Sarmi	96,12	90,08	93,35
Keerom	94,93	87,98	91,79
Waropen	98,54	94,34	96,50
Supiori	95,53	95,86	95,69
Mamberamo Raya	81,39	57,54	69,78
Nduga	33,64	24,42	29,30
Lanny Jaya	42,41	15,95	29,45
Mamberamo Tengah	54,54	14,66	35,29
Yalimo	45,25	30,11	38,33
Puncak	50,17	38,78	44,67
Dogiyai	39,62	23,71	31,65
Intan Jaya	33,96	24,81	29,80
Deiyai	37,34	16,04	26,62
Kota Jayapura	98,46	97,41	97,98
<b>Papua</b>	<b>78,44</b>	<b>67,04</b>	<b>73,05</b>

Sumber: Susenas 2018

**Tabel 10. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin, 2018**

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin		Laki-laki+ Perempuan
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Merauke	8,78	8,50	8,64
Jayawijaya	6,78	5,01	5,93
Jayapura	9,65	9,20	9,44
Nabire	9,41	8,97	9,21
Kep, Yapen	9,54	8,42	8,99
Biak Numfor	9,67	9,59	9,63
Paniai	6,28	4,34	5,35
Puncak Jaya	4,10	2,53	3,40
Mimika	9,88	9,69	9,80
Boven Digoel	8,86	7,61	8,31
Mappi	6,87	5,74	6,31
Asmat	5,43	4,07	4,76
Yahukimo	4,90	3,15	4,03
Peg, Bintang	5,96	3,85	4,95
Tolikara	5,12	2,76	4,05
Sarmi	9,07	8,29	8,72
Keerom	9,15	7,84	8,56
Waropen	10,08	8,90	9,52
Supiori	9,08	8,00	8,56
Mamberamo Raya	6,86	4,94	5,93
Nduga	3,49	2,15	2,89
Lanny Jaya	4,99	2,47	3,76
Mamberamo Tengah	4,72	1,80	3,31
Yalimo	4,97	3,15	4,13
Puncak	2,51	1,20	1,88
Dogiyai	3,72	2,07	2,89
Intan Jaya	3,27	1,40	2,32
Deiyai	3,01	1,48	2,26
Kota Jayapura	10,85	10,82	10,83
<b>Papua</b>	<b>7,22</b>	<b>5,93</b>	<b>6,61</b>

Sumber: Susenas 2018

Tabel 11. Persentase Penduduk Laki-laki 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki, 2018

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah	Jumlah Sampel
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	SMA/MA/SMLB/Paket C	D1/D2	D3	D4/S1/S2/S3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Merauke	18,89	24,31	20,99	25,40	0,83	1,19	8,40	100,00	584
Jayawijaya	34,03	23,34	16,76	17,92	0,23	2,15	5,57	100,00	553
Jayapura	16,12	14,66	17,53	44,83	0,32	0,74	5,79	100,00	606
Nabire	16,03	16,16	22,35	33,86	0,36	0,94	10,30	100,00	577
Kepulauan Yapen	13,37	20,45	20,10	33,81	0,96	1,77	9,54	100,00	635
Biak Numfor	12,61	24,67	15,74	34,02	0,57	2,00	10,38	100,00	655
Paniai	34,84	27,61	15,20	14,39	0,00	0,32	7,63	100,00	513
Puncak Jaya	56,85	18,35	14,49	5,00	0,43	0,71	4,18	100,00	544
Mimika	10,00	18,85	19,41	43,53	0,59	2,68	4,95	100,00	651
Boven Digoel	18,11	22,68	18,52	31,22	0,30	1,28	7,90	100,00	458
Mappi	28,32	39,15	14,82	12,44	1,55	0,09	3,64	100,00	631
Asmat	45,87	32,07	9,73	8,79	0,65	0,28	2,62	100,00	435
Yahukimo	43,64	33,48	12,00	6,43	0,00	0,08	4,37	100,00	641
Pegunungan Bintang	51,78	9,12	8,65	15,66	0,25	0,97	13,58	100,00	473
Tolikara	55,07	13,94	9,38	15,07	0,08	0,17	6,28	100,00	418
Sarmi	17,85	25,22	19,90	24,16	0,00	4,41	8,44	100,00	334
Keerom	16,79	20,83	19,22	32,51	1,37	3,47	5,81	100,00	424
Waropen	11,09	20,14	21,46	29,40	0,91	4,03	12,97	100,00	258
Supiori	18,28	22,50	20,38	26,07	0,32	1,14	11,30	100,00	265
Mamberamo Raya	30,15	26,76	22,61	17,57	1,03	0,43	1,45	100,00	214
Nduga	62,42	14,31	13,25	9,47	0,00	0,32	0,24	100,00	471
Lanny Jaya	55,46	8,36	18,04	11,35	0,00	0,33	6,46	100,00	459
Mamberamo Tengah	54,95	12,52	10,83	17,64	0,00	0,00	4,05	100,00	287
Yalimo	53,81	18,62	5,84	13,73	0,00	1,64	6,36	100,00	403
Puncak	71,54	15,14	6,21	5,06	0,36	0,34	1,35	100,00	573
Dogiyai	63,16	16,90	9,11	8,94	0,00	0,00	1,88	100,00	272
Intan Jaya	70,98	8,25	6,02	11,18	0,00	0,00	3,57	100,00	295
Deiyai	73,26	2,98	10,22	9,43	0,53	0,00	3,59	100,00	394
Kota Jayapura	9,66	13,72	15,40	45,34	0,26	1,75	13,87	100,00	738
<b>Papua</b>	<b>33,18</b>	<b>19,48</b>	<b>15,44</b>	<b>23,44</b>	<b>0,38</b>	<b>1,16</b>	<b>6,92</b>	<b>100,00</b>	<b>13 761</b>

Sumber: Susenas 2018

Tabel 12. Persentase Penduduk Perempuan 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2018

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah	Jumlah Sampel
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	SMA/MA/SMLB/Paket C	D1/D2	D3	D4/S1/S2/S3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Merauke	17,53	28,83	19,68	24,76	1,08	1,19	6,93	100,00	540
Jayawijaya	48,21	24,27	11,85	10,63	0,26	1,59	3,19	100,00	540
Jayapura	16,44	20,89	18,26	36,33	0,19	1,56	6,33	100,00	584
Nabire	16,56	18,89	25,97	27,22	1,28	3,30	6,77	100,00	541
Kepulauan Yapen	21,27	23,42	18,75	26,60	1,23	2,06	6,66	100,00	589
Biak Numfor	11,47	25,72	21,31	26,01	0,24	3,02	12,23	100,00	679
Paniai	50,81	26,53	13,25	3,96	0,54	2,96	1,95	100,00	473
Puncak Jaya	76,45	10,40	7,69	2,09	0,00	0,52	2,85	100,00	463
Mimika	10,32	21,09	24,64	32,32	1,31	2,90	7,42	100,00	588
Boven Digoel	31,59	24,99	9,55	21,89	0,00	4,62	7,37	100,00	408
Mappi	40,00	37,66	11,45	8,53	0,20	1,14	1,02	100,00	622
Asmat	61,75	20,86	11,17	3,56	1,05	1,13	0,47	100,00	420
Yahukimo	64,23	24,56	9,04	1,18	0,00	0,59	0,39	100,00	612
Pegunungan Bintang	67,02	8,56	7,59	8,80	0,00	2,56	5,47	100,00	445
Tolikara	75,08	11,48	6,59	5,36	0,00	0,63	0,87	100,00	401
Sarmi	25,13	25,42	16,78	17,93	0,95	5,16	8,63	100,00	305
Keerom	26,48	23,90	17,85	22,71	0,45	2,31	6,31	100,00	421
Waropen	17,49	24,60	20,70	25,54	0,34	5,09	6,23	100,00	245
Supiori	24,44	28,12	19,46	17,57	0,69	3,58	6,13	100,00	246
Mamberamo Raya	45,86	29,23	12,91	10,46	1,09	0,00	0,45	100,00	229
Nduga	73,09	16,65	6,97	3,13	0,00	0,00	0,17	100,00	442
Lanny Jaya	75,73	8,77	7,72	4,99	0,00	0,25	2,54	100,00	458
Mamberamo Tengah	80,55	7,14	9,39	1,96	0,00	0,00	0,97	100,00	285
Yalimo	68,26	15,83	6,36	5,81	0,00	0,46	3,28	100,00	414
Puncak	85,13	11,42	2,05	0,88	0,00	0,17	0,35	100,00	536
Dogiyai	80,71	10,18	5,28	3,54	0,00	0,00	0,28	100,00	253
Intan Jaya	86,71	5,21	4,51	1,68	0,00	0,00	1,89	100,00	308
Deiyai	84,80	4,54	7,00	3,06	0,00	0,00	0,61	100,00	350
Kota Jayapura	10,72	12,68	15,87	41,63	0,71	2,71	15,69	100,00	700
<b>Papua</b>	<b>44,00</b>	<b>19,07</b>	<b>13,52</b>	<b>16,21</b>	<b>0,45</b>	<b>1,66</b>	<b>5,09</b>	<b>100,00</b>	<b>13 097</b>

Sumber: Susenas 2018

Tabel 13. Persentase Penduduk Laki-laki dan Perempuan 15 Tahun ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2018

Kabupaten/Kota	Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki							Jumlah	Jumlah Sampel
	Tidak Mempunyai Ijazah	SD/MI/SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/Paket B	SMA/MA/SMLB/Paket C	D1/D2	D3	D4/S1/S2/S3		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Merauke	18,25	26,45	20,37	25,10	0,95	1,19	7,70	100,00	1 124
Jayawijaya	40,79	23,78	14,42	14,44	0,24	1,89	4,43	100,00	1 093
Jayapura	16,27	17,58	17,87	40,85	0,26	1,12	6,04	100,00	1 190
Nabire	16,28	17,42	24,02	30,79	0,79	2,03	8,67	100,00	1 118
Kepulauan Yapen	17,21	21,90	19,44	30,30	1,09	1,91	8,14	100,00	1 224
Biak Numfor	12,05	25,18	18,45	30,12	0,41	2,49	11,28	100,00	1 334
Paniai	42,50	27,09	14,27	9,39	0,26	1,59	4,90	100,00	986
Puncak Jaya	65,63	14,79	11,44	3,69	0,24	0,63	3,58	100,00	1 007
Mimika	10,13	19,79	21,60	38,84	0,89	2,78	5,98	100,00	1 239
Boven Digoel	24,06	23,70	14,56	27,10	0,17	2,75	7,66	100,00	866
Mappi	34,12	38,41	13,15	10,49	0,88	0,61	2,34	100,00	1 253
Asmat	53,72	26,52	10,44	6,20	0,85	0,70	1,56	100,00	855
Yahukimo	53,95	29,01	10,52	3,80	0,00	0,34	2,38	100,00	1 253
Pegunungan Bintang	59,11	8,85	8,14	12,36	0,13	1,73	9,68	100,00	918
Tolikara	64,15	12,82	8,12	10,66	0,05	0,38	3,82	100,00	819
Sarmi	21,11	25,31	18,50	21,38	0,42	4,75	8,53	100,00	639
Keerom	21,16	22,21	18,60	28,09	0,95	2,95	6,03	100,00	845
Waropen	14,14	22,26	21,10	27,56	0,64	4,54	9,77	100,00	503
Supiori	21,25	25,21	19,94	21,98	0,50	2,31	8,81	100,00	511
Mamberamo Raya	37,79	27,96	17,89	14,12	1,06	0,22	0,97	100,00	443
Nduga	67,24	15,37	10,41	6,60	0,00	0,17	0,21	100,00	913
Lanny Jaya	65,30	8,56	13,03	8,26	0,00	0,29	4,55	100,00	917
Mamberamo Tengah	67,31	9,92	10,13	10,07	0,00	0,00	2,56	100,00	572
Yalimo	60,49	17,33	6,08	10,07	0,00	1,09	4,93	100,00	817
Puncak	78,11	13,34	4,20	3,04	0,19	0,26	0,87	100,00	1 109
Dogiyai	71,97	13,53	7,19	6,23	0,00	0,00	1,08	100,00	525
Intan Jaya	78,92	6,72	5,25	6,38	0,00	0,00	2,72	100,00	603
Deiyai	78,94	3,75	8,63	6,29	0,27	0,00	2,12	100,00	744
Kota Jayapura	10,14	13,25	15,61	43,66	0,46	2,18	14,69	100,00	1 438
<b>Papua</b>	<b>38,27</b>	<b>19,29</b>	<b>14,54</b>	<b>20,04</b>	<b>0,41</b>	<b>1,39</b>	<b>6,06</b>	<b>100,00</b>	<b>26 858</b>

Sumber: Susenas 2018





Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

*Enlighten The Nation*



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI PAPUA**

Jl. Dr. Sam Ratulangi Dok II Jayapura 99112  
Telepon: 0967-534519, 533028 (Hunting) Fax: 536490  
Email: bps9400@bps.go.id Homepage: <http://papua.bps.go.id>